



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 36,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 36 Tahun 2019  
tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota  
Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2019**

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016–2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah rencana kerja yang berkelanjutan serta menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016-2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ketahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran peraturan yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.
10. *Inovasi* adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau memodifikasi dari yang sudah ada.
11. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
12. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
14. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan manfaat sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

## Pasal 2

RMRB Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 merupakan rencana kerja yang berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama 5 (lima) tahun.

## Pasal 3

RMRB sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## BAB II

## TUJUAN DAN SASARAN

## Pasal 4

- (1) Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
- (2) Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

## Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi meliputi:

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

## Pasal 6

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016–2021, terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu:

- a. Bidang Mental Aparatur;
- b. Bidang Pengawasan;
- c. Bidang Akuntabilitas;
- d. Bidang Kelembagaan;
- e. Bidang Tatalaksana;
- f. Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
- g. Bidang Peraturan Perundang-Undangan; dan
- h. Bidang Pelayanan Publik.

BAB III  
RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup RMRB Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Umum Birokrasi;
  - c. Agenda Reformasi Birokrasi;
  - d. Monitoring dan Evaluasi; dan
  - e. Penutup.
- (2) RMRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan RMRB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 6 November 2019

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

*Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika*

---

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar terhadap paradigma dan tata kelola pemerintahan Daerah. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, Reformasi Birokrasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diantaranya mampu mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur Negara, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta menjadi pendorong dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi pemerintahan sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik dirasakan tersendat/lambat, bertele-tele, *in-efisien*, organisasi belum optimal, maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta permasalahan birokrasi lainnya.

Kondisi Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat menyelesaikan atau melakukan perubahan terhadap permasalahan diantaranya perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat, lemahnya sistem pengawasan, kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kelembagaan perangkat daerah yang dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien, sebagian besar standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah namun belum optimal, Sistem manajemen SDM yang penerapannya masih dirasakan perlu adanya percepatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, serta penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam mengatasi permasalahan di atas perlu disusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2016 – 2021. Diharapkan pada tahun 2021, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan *mind-set* serta *cultur-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Pelaksanaan dari reformasi birokrasi itu sendiri perlu di rencanakan dengan baik agar dalam pelaksanaannya bisa optimal dan terukur serta dapat dievaluasi. Rencana tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) yang merupakan bentuk operasional *Grand Design* RB yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per-tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama dapat menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Bagi Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan, maka diharapkan dapat memenuhi tujuan akhir Reformasi Birokrasi. Permasalahan dari birokrasi di setiap daerah berbeda-beda. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, *Road Map* menjelaskan informasi penting lain yang mencakup penanggung jawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya. Secara umum, *Road Map* dapat diartikan sebagai peta penentu/petunjuk arah yang dapat menjadi alat panduan untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan

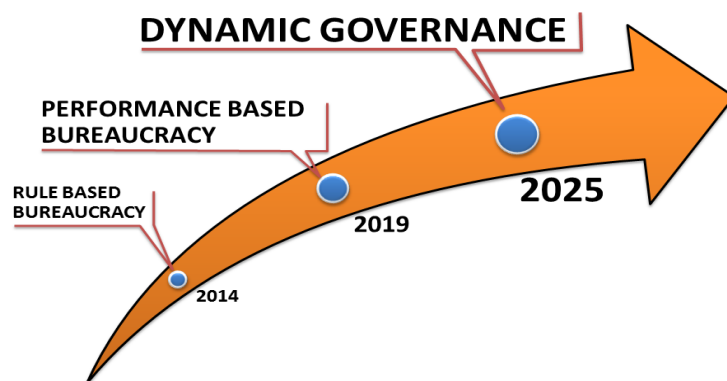
## 1.2. Tujuan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 disusun sebagai upaya untuk melanjutkan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai proses yang berkesinambungan menuju pada capaian sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.

Tujuan akhir dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2021 diharapkan melalui Reformasi Birokrasi, sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis. Hal tersebut diilustrasikan dalam gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1

### Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015



Berdasarkan hal tersebut di atas, dirumuskanlah tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan *Pertama*, memberikan kesamaan pemahaman mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi pada seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan *Kedua* memberikan panduan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kota Tangerang Selatan yang terintegrasi dengan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, bahwa kebijakan Sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi nasional adalah:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

### 1.3. Sistematika

Dalam menyusun Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, sistematika penulisan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* dan untuk substansi agenda Reformasi Formasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengacu pada arah kebijakan nasional yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, dan dalam rangka efektifitas penyajian analisa RMRB menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, berikut sistematika Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2016-2021:

#### 1. Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program dan kegiatan, *Quick Wins* dan rencana aksi serta indikator keberhasilan yang ditetapkan.

## 2. BAB I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan gambaran tentang latar belakang perlunya disusun *Road Map*, tujuan dan sistematika.

## 3. BAB II Gambaran Umum Birokrasi

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai: (A) Gambaran umum Kota Tangerang Selatan, yang memberikan penjelasan mengenai : (1) Gambaran Umum dan Sasaran Reformasi Birokrasi dan (2) Analisis Capaian Kinerja Birokrasi

## 4. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi

Bagian ini akan menguraikan mengenai : (A) Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ; (1) Prioritas yang harus dipelihara (2) Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Kota Tangerang Selatan (3) Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah. (B) Indikator keberhasilan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan (C) Rencana Program dan Hasil yang diharapkan (D) Quick Wins (E) Inovasi dalam Reformasi Birokrasi (F) Matriks rencana aksi program Reformasi Birokrasi dan (G) Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan.

## 5. BAB IV Monitoring dan Evaluasi

Bagian ini menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan berkelanjutan serta dampaknya kepada masyarakat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan: (A) pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi (B) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

## 6. Bab V Penutup

Bagian ini, menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan atas dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BIROKRASI

*Gambaran Umum dan Sasaran Reformasi Birokrasi, serta Analisis Capaian Reformasi Birokrasi*

---

#### 2.1. Gambaran Umum dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Kota Tangerang Selatan telah di susun sejak tahun 2014, namun dengan adanya berbagai kendala sehingga belum dapat diwujudkan sebuah Dokumen RMRB, untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyatakan “*bahwa RMRB merupakan tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah adalah tersedianya dokumen Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah*”. dokumen tersebut adalah langkah awal bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan hal tersebut diatas pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembali mengagendakan penyelesaian penyusunan Dokumen RMRB yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015–2019, serta menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

RMRB ini menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada 8 (Delapan) area perubahan, dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah “*Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi*” Pada hakekatnya Visi ini menggambarkan Kota Tangerang Selatan sebagai ruang bermukim dan berinteraksi yang dihuni oleh masyarakat *heterogen* dan majemuk menurut status sosial, identitas etnik (genealogi, bahasa, adat istiadat, dan tradisi), agama dan mata pencaharian. Secara umum visi tersebut dapat dimaknai sebagai kota bisnis dan pemukiman berkategori urban dengan kualitas ruang fisik dan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berstandar kota dalam dimensi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk periode 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

ditujukan untuk meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya agar daya saingnya meningkat, serta mampu mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Serta meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat miskin dengan harapan mampu menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional.

ditujukan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan sehingga dapat menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.

3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan.

ditujukan untuk sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata dan berkelanjutan.

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.

ditujukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (*green economy*) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas pembangunan diharapkan pada sektor basis daerah akan menjadi pondasi perekonomian daerah, makin besarnya peranan usaha mikro, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. pada sisi yang lain pertumbuhan penduduk terkendali dan pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga layanan terbaik kepada masyarakat mampu diberikan.

Sejalan dengan prinsip *good governance*, jika dikaitkan Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan 2016-2021 dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Misi I : Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi :
  - a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
  - b. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2. Misi II : Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
3. Misi III : Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
4. Misi IV : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan, mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
5. Misi V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi, mendukung Sasaran Reformasi Birokrasi :
  - a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
  - b. Birokrasi yang efektif dan efisien
  - c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Sehingga dapat disimpulkan keterkaitan Sasaran Reformasi Birokrasi sejalan dengan Misi Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk menentukan indikator yang sudah dicapai dan harapan dari pelaksanaan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan sesuai amanat Permenpanrb Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1

Sasaran, Hal Yang Sudah Dicapai dan Harapan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/Baik	Kebutuhan/Harapan
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini atas keuangan laporan WTP	Mempertahankan Opini WTP
		2. Tingkat Kapabilitas APIP saat ini level 2	Tingkat Kapabilitas APIP Level 3
		3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP saat ini Level 3	Mempertahankan Kematangan Implementasi SPIP Level 3
		4. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini B	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan BB

No	Sasaran Reformasi Birokrasi	Hal-hal yang sudah dicapai/Baik	Kebutuhan/Harapan
		5. Penggunaan e-Procurement sebesar 90%	Penggunaan e-Procurement sebesar 100%
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi B	Indeks Reformasi Birokrasi B
3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Rata-rata indek kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang Selatan 79 (B)	Rata-rata indek kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang Selatan 88 (A)

## 2.2. Analisis Capaian Kinerja Birokrasi

Reformasi birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah dicanangkan sejak tahun 2014. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan. Berbagai capaian terkait 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi telah diraih namun tidak hanya sampai di keberhasilan saja, dari capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan analisa terkait dengan hal yang perlu disempurnakan dan menghasilkan point berupa permasalahan dalam menjalankan program agar memenuhi target dan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam proses melakukan identifikasi permasalahan ini, dilaksanakan pembahasan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan asistensi bersama perangkat daerah pengampu atau penanggungjawab penyusunan dokumen *RMRB* yang kemudian mencari solusi agar dapat mencapai hasil/*goal point* sesuai dengan harapan. Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka dianalisis keterkaitan antara sasaran, arah kebijakan, area perubahan dan perangkat daerah penanggungjawab Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2  
Sasaran, Area Perubahan, Arah Kebijakan Nasional  
dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Reformasi Birokrasi

Sasaran	Area Perubahan	Arah Kebijakan Nasional	Perangkat Daerah Penanggungjawab
I. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mental Aparatur	Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.	1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 2. Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur 3. Inspektorat 4. Kecamatan 5. Rumah Sakit Umum (RSU) 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Perhubungan

Sasaran	Area Perubahan	Arah Kebijakan Nasional	Perangkat Daerah Penanggungjawab
	Pengawasan	Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis	1. Inspektorat 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. RSUD
	Akuntabilitas	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	1. BPKAD 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 4. Inspektorat 5. Bag. Organisasi dan Kinerja Aparatur
	Tata laksana	Peningkatan <i>fairness</i> , transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
II. Birokrasi yang efektif dan efisien	Penguatan Kelembagaan	Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur
	Penguatan Tata laksana	Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i>	1. Bag. Organisasi dan Kinerja Aparatur 2. Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kualitas kebijakan publik	1. Bag. Organisasi dan Kinerja Aparatur 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Bagian Pemerintahan
		Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



Sasaran	Area Perubahan	Arah Kebijakan Nasional	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
	Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	
	Akuntabilitas	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah,	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa	
	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur		Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.	1. Bag.Organisasi dan Kinerja Aparatur 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peltihan
			Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif	1. Bag.Organisasi dan Kinerja Aparatur 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peltihan
			Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif	1. Bag.Organisasi dan Kinerja Aparatur 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peltihan
			Penguatan Sisitem Manajemen SDM Aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Peltihan
	Pengawasan	Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi	Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah	
III. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Impelementasi UU Pelayanan Publik	1. Inspektorat 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu	

Sasaran	Area Perubahan	Arah Kebijakan Nasional	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			4. RSUD Kota Tangerang Selatan 5. Dinas Kesehatan 6. Kecamatan 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Dinas Perhubungan 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Badan Pendapatan Daerah 11. Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan analisa tabel di atas maka dapat analisa capaian kinerja Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Sasaran I, Arah Kebijakan, Target Nasional, Yang Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi dan Harapan,  
Rencana Aksi, Area Perubahan dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL									
1	Mental Aparatur	Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.	1.1. Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.	Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2017 Tentang Kode Etik PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Belum disosialisasikan nya Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2017 Tentang Kode Etik PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2017 Tentang Kode Etik PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	PNS memahami dan menerapkan nilai-nilai kode etik dan perilaku sesuai dengan Peraturan Walikota	2021	BKPP
			1.2. Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah.	Telah dilakukan internalisasi budaya kerja, terhadap pejabat dan pegawai pada perangkat daerah.	Belum tersusunnya Peraturan Walikota Tentang Budaya Kerja	Menyusun Peraturan Walikota Tentang Budaya Kerja dan Budaya Pelayanan	Terciptanya birokrasi yang bersih dan melayani.	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				-	Belum tersusunnya Peraturan Walikota tentang Budaya Pelayanan.	Internalisasi nilai dasar budaya kerja dan budaya pelayanan.	-	2021	BKPP

			1.3. Meningkatnya integritas aparatur	Penandatanganan pakta integritas setiap tahun untuk seluruh ASN.	Belum optimalnya komitmen pelaksanaan pakta integritas.	Monitoring dan evaluasi penegakan pelaksanaan pakta integritas ASN.	Meningkatnya integritas aparatur dan tumbuhnya agen perubahan di perangkat daerah.	2020 dan 2021	BKPP
				Terselenggaranya <i>Training Of Trainer</i> (TOT) tunas integritas untuk eselon 2 dan 3	Belum optimalnya penerapan <i>Training Of Trainer</i> (TOT) tunas integritas pada perangkat daerah.	Penetapan surat edaran perencanaan dan penerapan hasil <i>Training Of Trainer</i> (TOT) pada perangkat daerah.			
			1.4. Meningkatnya profesionalisme aparatur	Telah melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM untuk para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengurus Barang di seluruh perangkat daerah.	Belum optimalnya hasil Bimtek sesuai target yang diharapkan.	Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM di seluruh perangkat daerah secara berkala dan berkesinambungan		2016-2021	INSPEKTORAT

				Telah melaksanakan <i>assessment</i> penilaian integritas pada lingkup inspektorat.	-	-	-	2018	INSPEKTORAT
				Telah melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur melalui Diklat dan pendidikan formal.	Pegawai peserta Diklat belum dapat meningkatkan profesionalisme secara signifikan.	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil Diklat.	Meningkatnya profesionalisme Aparatur.	2019-2021	BKPP
			1.5. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat	-	-	-	-		
			1.6. Meningkatnya kepuasan masyarakat	Menambah jam pelayanan di luar jam dan hari kerja pada Kecamatan dan Kelurahan	-	Meningkatnya kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan diluar jam dan hari kerja	-	2018	Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur dan Pamulang
				Telah terakreditasinya rumah sakit dengan predikat paripurna No. KARS-SERT/1266/VII/2018.	Belum optimalnya komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.	Menerapkan reward and punishment kepada seluruh pegawai.	Meningkatnya kinerja serta komitmen pegawai RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan.	2020-2021	Rumah Sakit Umum

				Telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat tahun 2018 dengan nilai IKM 80,92.	Belum menindak lanjuti hasil survey secara optimal.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik di RSUD.	2019-2021	
				Telah terakreditasinya puskesmas oleh kemenkes dengan predikat 2 puskesmas Utama, 16 puskesmas madya, 6 puskesmas dasar.	Belum optimalnya komitmen pegawai dalam mengimplementasikan elemen-elemen penilaian akreditasi di puskesmas.	Peningkatan kapasitas building dengan cara melaksanakan Bimtek dan <i>Personality Improvement</i> .	Peningkatan pelayanan sehingga tercapai kepuasan masyarakat melalui panduan akreditasi.	2019-2021	Dinas Kesehatan
				Telah terakreditasinya labkesda oleh kemenkes dengan predikat paripurna, terakreditasi ISO 17025 ditahun 2018 namun untuk ISO 15189 hasilnya belum disampaikan oleh komite akreditasi nasional	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh labkesda.	Menyusun prosedur (SOP) tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan.	Peningkatan pelayanan sehingga tercapai kepuasan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memadai.	2019-2021	Dinas Kesehatan
				Telah melaksanakan uji kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor.	Target kuantitas pelayanan tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Menyusun kebijakan jumlah volume layanan pengujian kendaraan bermotor perhari.	Terjaganya kualitas kelaikan pengujian kendaraan bermotor.	2019	Dinas Perhubungan

				Telah memperoleh predikat ISO 9001:2015 pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor tentang pelayanan publik.	Belum optimalnya <i>quality control</i> pada indikator ISO 9001:2015.	Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM <i>quality control</i> .	Terjaminnya kualitas hasil pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	2020 dan 2022	Dinas Perhubungan
				Telah menyediakan fasilitas penilaian kepuasan masyarakat.	Fasilitas penilaian kepuasan masyarakat belum dialih mediakan menjadi digital.	Mengganti fasilitas penilaian kepuasan masyarakat menjadi layar interaktif.	Meningkatnya pasrtisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian.	2020	
2	Pengawasan	Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.	1.7. Meningkatkan kapasitas APIP .	Kapasitas APIP level 3.	Belum mempunyai APIP memberikan <i>insurance</i> terhadap tata kelola pemerintah secara menyeluruh.	Melaksanakan Bimtek/work shop Kapasitas APIP.	Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.	2016 - 2021	INSPEKTORAT
						Menetapkan tim penyusunan kelengkapan persyaratan kapasitas APIP menuju level 4.	Optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pada perangkat daerah.	2016 - 2021	

			1.8. Meningkatkan penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis	Telah terbangunnya aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) berupa SIM-HP.	Belum seluruh perangkat daerah dapat mengakses informasi SIM-HP.	Melaksanakan sosialisasi dan melakukan pengembangan sistem aplikasi SIM-HP.			
			1.9. Meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Telah melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap perangkat daerah secara berkelanjutan.	Jumlah pengawas/pemeriksa belum sebanding dengan jumlah objek yang diawasi/diperiksa.	Mengusulkan penambahan pengawasan dan pemeriksa.	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	2020	INSPEKTORAT
			1.10. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi	-	-	-			
			1.11. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur	Telah melakukan <i>review</i> dokumen perencanaan dan anggaran.	Hasil <i>review</i> dokumen perencanaan dan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan.	Menerbitkan surat penyampaian ketidak patuhan PPTK atas hasil <i>review</i> yang telah disampaikan.	Meningkatnya kepatuhan aparatur dan menurunnya tingkat penyimpangan.	2016-2021	
				Tersedianya layanan <i>coaching clinic</i> bagi aparatur.	Perangkat daerah belum maksimal memanfaatkan layanan <i>coaching clinic</i>	Melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi mengenai layanan <i>coaching clinic</i> secara berkelanjutan.		2018-2021	



				Telah diterapkan transaksi non-tunai pada pengelolaan keuangan.	Kurang optimalnya SDM pengelola keuangan transaksi non-tunai.	Melakukan pelatihan dan pendampingan pada SDM pengelola keuangan transaksi non-tunai.	Optimalnya pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan		
			1.12. Meningkatnya opini WTP – BPK.	Tercapaiannya Opini WTP BPK sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 dan 2017.	-	-	Dipertahankannya opini WTP - BPK	2016-2021	BPKAD
			1.13. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.	-	Belum tersusunnya kebijakan tentang pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.	Menetapkan tim pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	2016-2021	INSPEKTORAT
					Belum tersusunnya kebijakan tentang pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.	Menetapkan tim pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Menyusun kebijakan tentang penetapan pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	2016-2021	

			1.14. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di perangkat daerah	Telah menetapkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi.	Belum diimplementasikan Peraturan Walikota No.17 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi.	Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di Perangkat Daerah	Meningkatnya kepatuhan aparatur dalam melaporkan tindakan gratifikasi.	2016-2021	INSPEKTORAT
				Menyediakan <i>dropbox</i> pada perangkat daerah untuk pengendalian gratifikasi.	Belum seluruh perangkat daerah menyediakan <i>dropbox</i> sebagai alat pengendalian gratifikasi.	Menerbitkan surat edaran pengadaan <i>dropbox</i> sebagai alat pengendalian gratifikasi.		2016-2021	
			1.15. Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> di perangkat daerah;	-	Dalam proses pengembangan kelembagaan pelaksanaan <i>whistle blowing</i> .	Menyusun kebijakan tentang <i>whistle blowing system</i> .	Adanya perangkat deteksi dini untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran kode etik, perilaku aparatur dan benturan kepentingan	2016-2021	INSPEKTORAT
				-	-	Menetapkan tim pelaksanaan penanganan <i>whistle blowing system</i> .		2016-2021	
			1.16. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.	-	-	-	-	-	

			1.17. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;	Telah tercapainya SPIP kategori level 3.	Masih terbatasnya dukungan dokumen pencapaian pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah.	Menerbitkan prosedur penyusunan dokumen pencapaian pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah.	Terlengkapinya dukungan dokumen pencapaian pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah.	2016-2021	
						Melaksanakan Bimtek/sosialisasi tentang pelaksanaan SPIP.	Meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam pelaksanaan SPIP.		INSPEKTORAT
					Belum optimalnya pelaksanaan SPIP oleh pejabat pengelola pada perangkat daerah.	Melakukan pengawasan pengendalian SPIP secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Meningkatnya optimalisasi pelaksanaan SPIP pada perangkat daerah.	2016-2021	
			1.18. Penanganan pengaduan masyarakat di Perangkat Daerah	Tersedianya aplikasi pengaduan masyarakat melalui "Siaran Tangsel" siaran.tangerangselatankota.go.id	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pengaduan "Siaran Tangsel".	Menyusun kebijakan tentang penetapan tim pengelolaan aplikasi pengaduan "Siaran Tangsel".di setiap perangkat daerah	Ditindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat.	2020	DINAS KOMINFO

				Teselenggarannya proses pembangunan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.	<i>SIM Card</i> 112 belum terhubung dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Mempercepat proses uji coba penerapan <i>call center</i> 112.	-	2019	DINAS KOMINFO
					Belum adanya tim operator <i>call center</i>				
				Telah tersedianya ruang informasi dan pengaduan dengan dukungan tim <i>customer srvice</i> dan <i>manager on duty</i>	Masih terbatasnya jumlah tim <i>customer srvice</i> dan <i>manager on duty</i> dalam menangani pengaduan	Melakukan seleksi dan rekrutmen pegawai sesuai kompetensi.	-	2019	RSU Kota Tangerang Selatan
3	Akuntabilitas	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	1.19. Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Terintegrasinya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dengan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem	Belum terkoneksiya <i>IP address</i> SIAP BMD dengan SIMRAL.	Melakukan koneksi SIAP BMD engan SIMRAL.	Tersedianya laporan keuangan dan pengelolaan BMD yang cepat dan akuntabel.	2019	BPKAD

				Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD).					
			1.20. Meningkatkan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional	Telah diselenggarakan Bimtek dan sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE.	Kurangnya komitmen dan kesadaran dari perangkat daerah sebagai pengguna SPSE.	Menyusun instruksi walikota tentang tanggung jawab pengguna pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE di setiap perangkat daerah.	Aplikasi SPSE dapat digunakan lebih efektif dan efisien bagi perangkat daerah.	2019	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (SETDA)
				Telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang /Jasa.	Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang /Jasa. kepada seluruh perangkat daerah.	Melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang /Jasa. a pada seluruh perangkat daerah.	Semua pelaku pengadaan barang dan jasa mempedomani Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barjas.	2019	
			1.21. Meningkatkan <i>penerapan</i> sistem manajemen kinerja	Telah tersedianya aplikasi e-planning berupa (sistem informasi manajemen perencanaan).	Belum seluruh dokumen perencanaan terintegrasi berupa RENJA dan dokumen evaluasi.	Melakukan terintegrasinya RENJA dan dokumen evaluasi ke dalam SIMRAL.	Terciptanya kinerja pemerintahan yang akuntabel.	2019	

				Telah terbangunnya sistem transparansi aspirasi masyarakat berbasis teknologi melalui e-MUSRENBANG dan e-reses.	Belum maksimalnya pemahaman pemanfaatan e-MUSRENBANG dan e-reses.	Melaksanakan Bimtek e-MUSRENBANG dan e-reses pada tingkat kelurahan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan e-MUSRENBANG dan e-reses.	2019	BAPPEDA
				Telah melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	Terbatasnya kemampuan pemahaman SDM perencana dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.	Melaksanakan Diklat/Bimtek perencanaan pada perencana perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	2019 - 2020	
			1.22. <i>Meningkatnya</i> akuntabilitas aparatur	Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	2019-2021	INSPEKTORAT

				Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 188.4/Kep.7994/0rg/2018 tentang Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Belum optimalnya kinerja Tim dan peran seluruh perangkat daerah dalam menyelaraskan dokumen perencanaan.	Menyusun instruksi walikota tentang implementasi SAKIP di Kota Tangerang Selatan.	Selarasnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan kota.	2019	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				Telah memfasilitasi penyusunan LAKIP/LKIP Kota.	Belum optimalnya hasil penilaian Evaluasi SAKIP Pemeirntah Kota Tangerang Selatan.	Memfasilitasi penghimpunan, peng-inputan dokumen perencanaan dan menyusun LAKIP/LKIP secara berkala.	Meningkatnya hasil evaluasi SAKIP Kota Tangerang Selatan.	2019 - 2021	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
4	Tatalaksana	Peningkatan <i>fairness</i> , transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa	1.23. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang <i>dan</i> jasa secara elektronik.	Telah diterapkannya SPSE ver. 4.3.	Kurangnya pemahaman pengguna layanan Barang/Jasa terhadap SPSE ver. 4.3	Melaksanakan bimbingan teknis secara berkelanjutan SPSE ver. 4.3	Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara baik, efektif, efisien, adil, transparan, akuntabel dan profesional	2019	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (SETDA)

Tabel 4

Sasaran II, Arah Kebijakan, Target Nasional, Yang Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi dan Harapan,  
Rencana Aksi, Area Perubahan dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
1	Penguatan Kelembagaan	Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.	Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan;	Ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Adanya pedoman evaluasi kelembagan yang ditetapkan pasca penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2016.	Memfasilitasi penyusunan kajian penataan perangkat daerah	Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi, ukuran dan tepat proses	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Ditetapkannya Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah	Terlambatnya penetapan pedoman SOTK dan Tusi Perangkat Daerah dari Kementeri/ Lembaga.	Memfasilitasi penataan SOTK, tugas dan fungsi perangkat daerah/unit kerja		2017-2021	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
			Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;	Ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeirntah Daerah	-	-	-	2016	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
2	Penguatan Tatalaksana	Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i>	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i> .	Ditetapkannya Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Peraturan Walikota Tentang Pedoman Tata Naskah sudah tidak relevan dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan di atasnya.	Melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Penyusunan naskah dinas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2019	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
					Belum terlaksananya sosialisasi Perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Melakukan sosialisasi Perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Optimalnya penerapan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas.	Belum optimalnya penerapan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas.	Melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas.	Meningkatnya estetika berpakaian bagi ASN	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				Melaksanakan pendampingan penyusunan SOP pada 38 perangkat daerah dan 4 UPT.	Kurangnya kesiapan perangkat daerah dalam sumber daya manusia, kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun prosedur kerja.	Melakukan pendampingan identifikasi kebutuhan dan penetapan tim kerja yang akan melakukan penyusunan pada perangkat daerah	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendampingan penyusunan SOP dan hasil yang maksimal.	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				Tersusunnya SOP pada 24 (dua puluh empat) perangkat daerah.	Hasil dari penyusunan prosedur kerja yang dilakukan perangkat daerah tidak	Menyusun Peraturan Walikota Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan SOP.	Memudahkan pelaksanaan penyusunan SOP bagi perangkat daerah.	2020	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
					disampaikan kembali pada bagian organisasi dan kinerja aparatur tepat waktu.				
				Terbangunnya aplikasi pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan, perencanaan dan penganggaran, kependudukan, kepegawaian, sistem surat-menyerat dan pengaduan masyarakat.	Belum seluruh aplikasi memiliki payung hukum sebagai dasar penggunaannya.	Menyusun kebijakan tentang penerapan aplikasi pelayanan	Optimalisasi penggunaan aplikasi pelayanan	2021	DINAS KOMINFO

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Meningkatnya kualitas tata hubungan antara perangkat daerah	Melakukan pendampingan penyusunan SOP internal perangkat daerah dan Lintas perangkat daerah.	Belum semua perangkat daerah mempedomani SOP antar Perangkat Daerah.	Melaksanakan Bimtek/workshop bagi PPID pembantu secara berkala.	Optimalisasi peran PPID pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.	2019-2021	DINAS KOMINFO
			Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publi	Ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 04.3/kep.206-Huk/ 2018 tahun 2018 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.	Belum optimalnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi PPID pembantu pada perangkat daerah.	Menyusun kebijakan tentang pengumpulan data informasi publik.	Meningkat nya penerapan keterbukaan informasi publik.	2020	DINAS KOMINFO
					Belum seluruh perangkat daerah melengkapi data informasi publik.	Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik.	Adanya kejelasan standard layanan informasi publik.	2019	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Diraihnya predikat "C" sebagai Badan publik yang cukup informatif dalam implementasi UU no.14 tahun 2008 dari Komisi Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Banten.	Belum tersusunnya Standard Pelayanan (SP) dan Standard Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik.			-	
		Peningkatan kualitas kebijakan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan	Pendampingan proses ISO 9001:2015 pada perangkat daerah.	Kurangnya kesiapan perangkat daerah dalam proses penyusunan manajemen mutu.	Melakukan pendampingan identifikasi kebutuhan dalam penyusunan manajemen mutu pada perangkat daerah.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pendampingan penyusunan manajemen mutu.	2019-2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Ditetapkannya Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standard Pelayanan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik.	Belum optimalnya penerapan Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standard Pelayanan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik.	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standard Pelayanan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik.	Meningkatnya kualitas pelayanan	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
			Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun/mengelola aplikasi yang terintegrasi seperti Sisumaker, aplikasi Time Table, Lasik (Apik & Simpeg), Simral.	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pengelolaan aplikasi.	Membangun komitmen dan persamaan persepsi tujuan dalam manajemen pengelolaan aplikasi.	Mendapatkan indeks SPBE katagori baik.	2020	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Pembangunan data center.	Belum terpusatnya server dan aplikasi yang ada di Kota Tangerang Selatan pada data center.	Menyusun kebijakan tentang centralisasi pengelolaan IT	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan.	2019	DINAS KOMINFO
				Pembangunan <i>command center</i> .	Belum terbangunnya jaringan <i>fiber optic</i> secara menyeluruh pada perangkat daerah.	Pembangunan jaringan fiber optic secara bertahap.		2017-2021	DINAS KOMINFO
				Pembangunan jaringan internet bagi seluruh perangkat daerah.	Belum ditetapkannya autentifikasi kebijakan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.	Melakukan percepatan proses autentifikasi kepada unit kerja yang memiliki kewenangan.		2020	



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Menyusun kebijakan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang di dalamnya mewajibkan pemilik menara untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan jaringan.	Belum optimalnya partisipasi perangkat daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan SDM TIK.	Menyusun peta kebutuhan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM TIK.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	2019	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Melaksanakan pembinaan TIK kepada siswa SD, SMP, masyarakat umum, UKM, guru dan kepala sekolah.				-	DINAS KOMINFO
				Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM aparatur (Pelatihan desain grafis, Web Development, Mikrotik).	-	-	-	-	DINAS KOMINFO
			Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.	Pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan.	Belum optimalnya penerapan standard pelayanan.	Penyusunan Peraturan Walikota tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi penyelenggara pelayanan public.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	2019-2021	Bagian Pemerintahan (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Ditetapkannya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.	Belum maksimalnya penerapan kebijakan PERDA No. 10 Tahun 2016 Tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan.	Menyusun kajian pemekaran kelurahan berdasarkan PERDA No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.	Terwujudnya komposisi kelurahan yang proporsional.	2019-2021	Bagian Pemerintahan (SETDA)
				Ditetapkannya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perubahan Status Lma Desa Menjadi Kelurahan.	Penyusunan LPPD melalui sistem online (semi online).	Memfasilitasi pembangunan sistem LPPD online .	sinkronisasi program disemua tingkatan serta peningkatan kinerja perangkat daerah.	2019-2021	Bagian Pemerintahan (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Penyusunan LPPD melalui sistem online (semi online).	Belum optimalnya partisipasi dan dukungan perangkat daerah dalam penyusunan dan tindak lanjut hasil penilaian LPPD.	Memfasilitasi hasil penilaian LPPD agar menjadi bahan evaluasi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.	Terciptanya perencanaan kerja sama daerah yang optimal.	2019-2021	Bagian Pemerintahan (SETDA)
				Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah.	Belum disusunnya <i>grand design</i> kerja sama daerah.	Merencanakan dan menyusun <i>grand design</i> kerja sama daerah.	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan terhadap penerimaan kunjungan kerja.	2019-2021	
					Belum optimalnya data kerja sama yang dilakukan oleh perangkat daerah.	Melakukan sosialisasi dan monev.	-	2019-2021	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Ditetapkan nya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerimaan Kunjungan Kerja.	Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerimaan Kunjungan Kerja.	Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerimaan Kunjungan Kerja.	-	2019-2021	Bagian Pemerintahan (SETDA)
	Peraturan Perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan.	Dilakukannya konsultasi publik oleh pemrakarsa produk hukum daerah.	Peserta yang hadir dalam konsultasi publik belum tepat sasaran dan kurang berkompeten sehingga belum optimal dalam memberikan usulan.	Memfasilitasi kehadiran unsur tenaga ahli perumusan produk hukum daerah.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi kualitas produk hukum daerah.	2019-2021	Bagian Hukum (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.	Melibatkan instansi dan akademisi terkait : KEMENKUMHAM, Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi Banten, Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait lainnya dalam pembahasan dan Penyempurnaan produk hukum daerah.	Kehadiran peserta pembahasan produk hukum daerah tidak semuanya yang berkompeten.	Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dan intens dengan perangkat daerah terkait pembahasan produk hukum daerah.	Tercapainya produk hukum daerah yang berkualitas dan dapat di implementasi kan.	2019-2021	Bagian Hukum (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan.	Telah menginventarisir dan melakukan pembahasan produk hukum daerah yang sudah ditetapkan.	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi menganalisa produk hukum daerah.	Bekerja sama dengan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam pengkajian produk hukum daerah.	Terciptanya produk hukum daerah yang tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan produk hokum.	2019-2021	
					Belum disusunnya perencanaan dan penganggaran pengkajian produk hukum daerah.	Menyusun perencanaan/ <i>Road Map</i> dan penganggaran pengkajian produk hukum daerah setiap tahun anggaran.		2019-2021	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.	Memfasilitasi pembahasan usulan produk hukum daerah yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.	Terbatasnya waktu dan anggaran untuk melakukan inventarisasi terhadap produk hukum yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan pengkajian produk hukum daerah.	Terciptanya produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.	2019 dan 2020	Bagian Hukum (SETDA)



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.	Melakukan pengkajian dan pembahasan bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan pencabutan produk hukum daerah yang menghambat pelayanan.	Belum adanya peraturan perundang-undangan diatas produk hukum daerah yang mengamanatkan bahwa produk hukum daerah tersebut dilakukan deregulasi.	Fasilitasi pembahasan untuk mendapatkan persetujuan pencabutan produk hukum daerah yang menghambat pelayanan bersama legislatif dan eksekutif (Pemerintah Provinsi/Pusat).	Terciptanya percepatan pelayanan di Kota Tangerang Selatan.	2020	Bagian Hukum (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
		Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu	Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.	Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.	Kode klasifikasi arsip perangkat daerah belum sesuai ketentuan.	Revisi perwal Nomor 41 Tahun 2013 tentang klasifikasi arsip yang disesuaikan dengan kelembagaan	Seluruh perangkat daerah berpedoman pada perubahan Perwal Nomor 41 Tahun 2013.	2019 dan 2020	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Tersedianya Peraturan Walikota No 41 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Arsip.	SOP arsip belum sesuai dengan kelembagaan DPAD.	Melakukan revisi terhadap SOP arsip.	Revisi SOP arsip menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kearsipan.		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Tersedianya SOP bidang kearsipan.	Prasarana dan sarana belum memadai namun saat ini sedang dalam proses pembangunan gedung perpustakaan dan depot arsip tingkat Kota.	Percepatan proses pembangunan gedung perpustakaan dan depot arsip tingkat Kota.	Depot arsip menjadi pusat rujukan layanan dan penyediaan data/informasi	2019 dan 2020	
				Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip sesuai dengan standar baku kearsipan.	Belum seluruh perangkat daerah memiliki ruang <i>record centre</i> .	Penyusunan kebijakan tentang penyediaan ruang <i>record center</i> .	Tertatanya arsip inaktif di seluruh perangkat daerah.	2020	
				Tersedianya mobil layanan sadar arsip.	Masih kurangnya sarana pendukung seperti PC dan Scanner.	Penyediaan sarana pendukung sesuai dengan standar kearsipan.	Optimalnya pengelolaan arsip di seluruh OPD menuju digitalisasi arsip.	2020	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Penunjukan pengelola arsip pada setiap perangkat daerah.	Sering bergantinya pengelola arsip pada perangkat daerah.	Penetapan Keputusan Walikota tentang jabatan fungsional arsiparis dan pembantu pengelola arsip dari PNS dan Non-PNS.	Adanya jabatan fungsional arsiparis dan pembantu pengelola arsip dari PNS dan Non-PNS.	2020	
				Akuisisi (penarikan) arsip bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan kelembagaan.	Arsip yang ada merupakan arsip yang tidak tertib/tidak teratur	Pengelolaan dan penataan arsip	Terselamatkan ya arsip	2019-2021	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Penerapan sistem kearsipan yang handal.	Tersedianya aplikasi Sistem Kearsipan Daerah (SIKD).	Belum terintegrasinya penerapan sistem aplikasi kearsipan di seluruh perangkat daerah.	Penyusunan kebijakan kepala daerah tentang pengintegrasian data melalui sistem aplikasi kearsipan dari perangkat daerah.	Tertatanya arsip digital.	2020	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
					Belum seluruh arsip dialih mediakan menjadi digital.	pencanangan target digitalisasi arsip.	Melaksanakan digitalisasi arsip sesuai target.	2020	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
					Kurangnya kemampuan pengelola arsip dalam mengoperasikan sistem aplikasi kearsipan daerah.	pendampingan terhadap pengelola arsip dalam mengoperasikan sistem aplikasi kearsipan daerah.	Pengelola arsip handal dalam mengoperasikan sistem aplikasi kearsipan daerah.	2021	
					Belum disusunnya peraturan tentang penerapan SIKD.	Penyusunan peraturan tentang penerapan SIKD.	Telah ditetapkannya peraturan tentang penerapan SIKD.	2020	
2	Akuntabilitas	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah,	Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Diperbaharui nya SPSE ver. 3.6 menjadi SPSE ver. 4.3 dalam proses tender pengadaan barang/jasa	Kurangnya pemahaman pengguna layanan Barang/Jasa terhadap penggunaan aplikasi SPSE	Dilakukannya bimbingan teknis secara berkelanjutan terkait tatacara penggunaan aplikasi SPSE ver. 4.3	Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota	2019	Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
					ver. 4.3 dikarenakan aplikasi ini memiliki fitur dan tatacara penggunaan yang berbeda dengan aplikasi SPSE ver. 3.6	dengan mengundang pakar dari LKPP-RI.	Tangerang Selatan secara baik, efektif, efisien, adil, transparan, akuntabel dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.	Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif.	Melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, BPSDM Prov. Banten dalam meningkatkan kemampuan unit yang mengelola SDM ASN.	Belum optimalnya pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan.	Penyesuaian klausul perjanjian kerja sama di tahun berikutnya.	Terciptanya proses kerjasama yang optimal.	2019-2021	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit	Menetapkan panitia seleksi daerah untuk pelaksanaan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.	Belum adanya jadwal pelaksanaan lelang jabatan yang terencana.	Menetapkan kesepakatan jadwal antara KASN dan BKPP.	Meningkatnya kualitas seleksi dalam pemenuhan penempatan pejabat.	201-2021	
				Melakukan assessment bagi pejabat JPT dan Administrator.	Belum melaksanakan asesment bagi seluruh pegawai.	Melaksanakan asesment untuk semua pegawai dan juga penganggarannya.	Meningkatnya kualitas seleksi dalam pemenuhan penempatan pejabat.	2019-2021	BKPP
				Menetapkan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota tentang TPP PNS tahun 2018 dan telah diberlakukan.	Belum terlaksananya tim evaluator kinerja ASN sebagaimana diamanatkan dalam Perwal TPP PNS tahun 2018.	Mengoptimalkan tugas dan fungsi tim evaluator kinerja PNS.	Meningkatnya kinerja PNS .	2019-2021	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Melaksanakan internalisasi dan fasilitasi kode etik dan perilaku ASN.					
		Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.	meningkatkan jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur.	Menyusun dokumen analisa jabatan, analisa beban kerja dan peta jabatan perangkat daerah.	Belum dihitung analisis beban kerja terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana secara riil.	Melakukan perhitungan ABK untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sehingga dapat diketahui kebutuhan riilnya	Meningkatnya pemahaman aparatur dalam mengidentifikasi secara komprehensif terkait substansi teknis.	2019-2021	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Menyusun beberapa rancangan standar kompetensi jabatan teknis.					
			Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya	-	-	-	-		
			Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi.	Tersedianya sistem layanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi.	Belum tersosialisasinya di OPD aplikasi Simpeg online pada aplikasi LASIK.	Melakukan sosialisasi Simpeg online pada perangkat daerah.	Optimalnya Layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.	2019	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
					Belum tersedianya modul diklat pada aplikasi LASIK.	Bekerja sama dengan Diskominfo untuk penambahan fitur-fitur pada aplikasi.		2020	
		Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif	Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan	Mengirimkan para pegawai ke “Rumah Perubahan” dan Diklat Kepemimpinan.  Mengirimkan pegawai berdasarkan jenjang jabatan ke ESQ 165.	Pegawai yang mengikuti ( <i>agen of change</i> ) belum dapat optimal melakukan perubahan kepada seluruh pegawai dilingkungannya.	Perlu adanya komitmen dan dukungan sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan perubahan.	Terwujudnya perubahan pola pikir dan <i>mindset</i> aparatur.	2020-2021	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.	Dibentuknya <i>Change Management Officer</i> Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 893./Kep.491-Huk /2018.	Belum optimalnya dukungan prasarana dan sarana operasional tim <i>Change Management Officer</i> Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Penyediaan prasarana dan sarana sekretariat operasional tim <i>Change Management Officer</i> Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Tim <i>Change Management Officer</i> dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.	2020-2021	BKPP
			Melaksanakan workshop atau pelatihan agar dapat membuka wawasan seperti "Rumah Perubahan", Mark Plus, dan lain-lain.						

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke KASN dan Kementerian PANRB terkait penerapan sistem merit.	Beberapa kebijakan hasil konsultasi dan koordinasi belum semua dapat diterapkan di Kota Tangerang Selatan.	Menyusun pola karir dan standard kompetensi jabatan.	Dilaksanakannya penerapan sistem merit secara menyeluruh di Kota Tangerang Selatan.	2016-2021	BKPP
				Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja, dalam bentuk peta jabatan dan evaluasi jabatan.	Belum seluruh data ASN pada perangkat daerah tervalidasi.	Menetapkan pegawai yang secara khusus menangani pembaharuan persediaan pegawai pada masing-masing perangkat daerah.	Tersedianya dokumen/data ASN pada masing-masing perangkat daerah secara valid dan up to date.	2016-2021	BKPP
			Meningkatnya profesionalisme aparatur	Pengiriman Diklat teknis kepada seluruh aparatur.	Belum optimalnya perencanaan Diklat teknis bagi aparatur.	Menyusun <i>Road Map</i> perencanaan dan pelaksanaan Diklat teknis.	Meningkatnya profesionalisme aparatur.	2016-2021	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN	Pelaksanaan pemetaan pegawai. Tersusunnya <i>Bezeeting</i> pegawai sesuai hasil pemetaan pegawai.	Belum sesuai bzeeting peta pegawai dengan kondisi saat ini.	Penyusunan perubahan peta pegawai.	Kesesuaian peta pegawai dengan perencanaan kebutuhan pegawai.	2016-2021	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				Memperbaharui dokumen Peta Jabatan perangkat daerah.	Masih rendahnya ketertarikan pegawai untuk menjadi jabatan fungsional.	Melakukan sosialisasi dan membuat surat edaran mengenai jabatan fungsional.	Tersedianya dokumen Peta Jabatan perangkat daerah yang menginformasikan jenis dan kebutuhan jabatan fungsional.	2019 dan 2020	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	Melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT).	Proses penetapan hasil seleksi diperlukan waktu.	Merevisi SOP seleksi JPT.	Hasil kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi dapat tepat waktu dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.	2019-2021	BKPP
			Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.	-	-	-	-	-	-
			Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan <i>assessment center</i> .	-	-	-	-	-	-

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	Ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Pemberian TPP belum dapat meningkatkan kinerja PNS secara maksimal.	Penambahan indikator pengukuran kinerja.	Pemberian TPP dapat meningkatkan kinerja PNS secara maksimal.	2019-2021	BKPP
			Perumusan dan penetapan kebijakan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja.	Perubahan Perwal No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS Di Lingkungan Pemkot Tangerang Selatan.					
			Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN.	Dibangunnya aplikasi SIMPEG secara online.	Perlu penyempurnaan fitur pelayanan SIMPEG.	Bekerja sama dengan DINA SKOMINFO untuk pengembangan fitur pelayanan.	Meningkatnya pelayanan sistem informasi ASN.	2019-2021	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN.	Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan bagi PNS dilingkup Kota Tangerang Selatan yang berpedoman pada peraturan Kepala BKN nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Belum tersedianya dokumen Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN	Disusunnya Standar Kompetensi per jabatan ASN	Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan ASN	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				Memaksimalkan jumlah ketersediaan pegawai untuk menyelesaikan tugas dan capaian kinerja.	Terbatasnya bimbingan teknis dan administrasi.	Mengadakan bimbingan teknis dan administrasi secara berkala.	Tersedianya pegawai pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.	2019-2021	BKPP



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.	Pemanfaatan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi sebagai bahan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).	Masih terdapatnya <i>gap</i> antara profil kompetensi/ syarat kompetensi yang sudah ada dengan realita	Mengirimkan Pendidikan dan Pelatihan bagi apartur PNS untuk memperkecil <i>gap</i> .	Makin kecilnya <i>gap</i> antara profil kompetensi dengan syarat kompetensi.	2019-2021	BKPP
				Tersedianya dokumen analisa jabatan dalam sistem aplikasi ANJAB.	Dokumen Anjab yang tertuang dalam sistem aplikasi anjab, belum divalidasi secara menyeluruh mengingat ketersediaan pegawai yang memvalidasi masih terbatas.	Fasilitasi validasi anjab oleh Kemenpanrb/ BKN	Tersedianya dokumen anjab yang telah divalidasi dan dapat dimanfaatkan untuk manajemen kepegawaian.	2021	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat	Dilakukan kerjasama pengirman peserta Diklat dengan Badan Diklat Provinsi dan K/L	Belum adanya kebijakan pengendalian dan evaluasi Diklat.	Menyusunan kebijakan pengendalian dan evaluasi Diklat.	Meningkatnya kualitas Diklat Aparatur	2019-2021	BKPP
			Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Meningkatkan koordinasi untuk mendapatkan rekomendasi dari KASN pada setiap tahapan hingga tahapan akhir pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama.	Proses pelaksanaan Seleksi JPT Pratama yang memakan waktu dikarenakan setiap tahap-tahap pelaksanaannya selalu berkoordinasi dan meminta rekomendasi dari KASN.	Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak KASN.	Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi dapat dilaksanakan secara optimal.	2019-2021	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN.	Sedang melakukan penyusunan Peraturan Walikota Tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian.	Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Pola Karir Nasional.	Berkoordinasi dengan Kemenpan RB.	Ditetapkannya pola karir pegawai PNS.	2019-2021	BKPP
				Melakukan perancangan pola karier ASN	Belum adanya regulasi mengenai pola karir bagi ASN	Menyusun tim perumus kebijakan/tim kerja dan rancangan Perwal Pola Karier ASN	Tersedianya regulasi yang mengikat mengenai pola karir.	2021	BKPP
		Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.	Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.	Menyusun syarat jabatan bagi ASN yang memangku jabatan tertentu.	Belum terbentuknya Tim Kerja untuk melaksanakan pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.	Membentuk dan menetapkan tim kerja untuk melaksanakan pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.	Tersedianya dokumen hasil pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.	2020	BKPP

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
			Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja	Menyusun analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan di seluruh perangkat daerah.	Belum optimalnya implementasi analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan di seluruh perangkat daerah.	Menyusun kerjasama dengan unsur swasta dalam rangka peran serta peningkatan kinerja Aparatur.	Meningkatnya kinerja aparatur dengan dukungan unsur swasta.	2019-2021	BKPP
	Pengawasan	Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.	Meningkatnya efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.	Ditetapkannya tim penelaah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) oleh Walikota.	-	-	-	-	BPKAD

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. SASARAN : BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFESIEN									
				Penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sudah dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi penelaahan online.	Kurangnya tingkat pemahaman pengguna aplikasi penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara online.	Melaksanakan Bimtek bagi pengguna aplikasi penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara online.	Pengguna aplikasi dapat menggunakan aplikasi penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) online secara optimal.	2019	BPKAD
					Belum optimalnya fitur yang terdapat dalam aplikasi penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara online.	Mengusulkan pengembangan fitur pada aplikasi penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara online.	Fitur pada aplikasi penelaahan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara online dapat digunakan dengan mudah.	2019	BPKAD

Tabel 5

Sasaran III, Arah Kebijakan, Target Nasional, Yang Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi dan Harapan,  
Rencana Aksi, Area Perubahan dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Impelementasi UU Pelayanan Publik	Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik	Telah melakukan evaluasi terhadap kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik secara berkala.	Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban dan tanggung jawab.	Meningkatkan fungsi pengawasan internal secara berjenjang oleh perangkat daerah.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.	2016-2021	INSPEKTORAT
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat setiap tahun, dengan IKM 84,40 kategori "B" pada tahun 2018.	Belum maksimalnya tindak lanjut pembenahan dari hasil survey.	Menyusun kebijakan tentang tindak lanjut pembenahan hasil survey kepuasan masyarakat di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kota Tangerang Selatan.	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
					Belum ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Survey Kepuasan Masyarakat.	Menetapkan dan mensosialisasikan Peraturan Walikota Tentang Survey Kepuasan Masyarakat.	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kota Tangerang Selatan.	2020	Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur (SETDA)
				Hasil SKM pada tahun 2018 mendapatkan Nilai "B".	Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat.	Melakukan percepatan tindak lanjut hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat.	Mendapat nilai IKM "A" pada survey kepuasan masyarakat.	2021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pelayanan pembuatan paket dokumen kependudukan	Masih kurangnya kecepatan pelayanan pembuatan paket dokumen kependudukan.	Meningkatkan kompetensi pemangku jabatan dalam mempedomani ketentuan indikator penerapan manajemen ISO.	Meningkatnya komitmen pemangku jabatan dalam mempedomani ketentuan indikator penerapan manajemen ISO.	2020	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi dan stackholder lainnya di Kota Tangerang Selatan.	Belum optimalnya pelaporan data balikan dari instansi pengguna pemanfaatan data kependudukan.	Menyusun modul pedoman penggunaan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.	Meningkatnya kepatuhan instansi dalam pemanfaatan data kependudukan dan pelaporan data balikan.	2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Telah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai.	Belum maksimalnya sarana dan prasarana yang disediakan.	Melaksanakan internalisasi terkait pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.	Dapat memberikan sarana dan prasarana yang maksimal.	2020	
				Telah melaksanakan Diklat <i>excellent services</i> agar terwujudnya aparatur dinas yang handal dan berkompeten dibidangnya.	Kurangnya konsistensi dalam penerapan manajemen pelayanan <i>excellent services</i> .	Fasilitasi termin Diklat 2 kali dalam setahun.	Menigkatnya kesadaran SDM pelayanan dalam penerapan <i>excellent services</i> .	2019 dan 2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Seluruh proses pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis SIAK.	Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pembaharuan regulasi yang terdapat dalam aplikasi SIAK.	Menambah media informasi pada kelurahan dan tempat strategis lainnya terkait pembaharuan regulasi aplikasi SIAK.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembaharuan regulasi dalam aplikasi SIAK.	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Telah menyediakan pendaftaran online untuk mengurangi jumlah antrian.	Belum optimalnya ketetapan waktu yang diberikan oleh pelayanan pendaftaran online melalui website.	Melakukan pengembangan fitur pendaftaran online terkait ketetapan waktu.	Memberikan kemudahan pada masyarakat dan mengurangi kepadatan antrian.	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Telah menyusun etika pelayanan.	-	-	-		

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah melaksanakan pembuatan KTP el sehari jadi melalui pendaftaran online.	-	-	-		
				Melayani masyarakat dalam proses perizinan dan pengaduan melalui live chat.	Proses layanan live chat harus memiliki akun pemohon terlebih dahulu belum menyediakan modul informasi untuk masyarakat umum.	Meningkatkan penanganan pengaduan terhadap proses pelayanan perizinan baik secara online (live chat) atau secara langsung.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang di dukung dengan prasarana, sarana dan SDM yang sesuai kompetensi dan standar pelayanan.	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya SDM yang melaksanakan layanan perizinan sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan.	Belum semua masyarakat pengguna layanan perizinan mengoptimalkan SDM yang ditugaskan di Kecamatan dan Kelurahan memberikan pendampingan.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.	Tercapainya proses pelayanan di Kota Tangerang Selatan secara cepat, tepat, efisien dan efektif	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
				Menyediakan ruang layanan mandiri dan tenaga pendamping untuk masyarakat yang ingin memperoleh informasi layanan perizinan dan pengaduan.	Terdapat petugas pelayanan yang kurang ramah dalam melayani masyarakat.	Menyusun kebijakan tentang kode etik pelayanan dan tata cara rekrutmen petugas pelayanan.		2019 -2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Memfasilitasi layanan perizinan dengan mobil keliling perizinan.	Masih ada keluhan masyarakat terhadap lamanya verifikasi oleh tim teknis dan pengiriman oleh PT POS.	Melakukan integrasi SOP PT POS dengan DPMPTSP.		2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
				Menyusun perubahan Keputusan Walikota Nomor : 503/Kep.313-Huk/2017 Tentang Pendelegasian Perizinan Dan Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Masih ada keluhan masyarakat terhadap kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi.	Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perizinan.		2020	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Penyempurnaan SOP dan pendelegasian kewenangan.	Masih terdapatnya masyarakat yang belum memahami proses pelayanan perizinan.	-	-		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
				Telah ditetapkan Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2018 Tentang Standard Pelayanan Minimal RSUD Kota Tangerang Selatan.	Belum dapat merealisasikan beberapa indikator standard pelayanan minimal secara optimal.	Membuat inovasi dalam menyelenggarakan standard pelayanan minimal RSUD.	Tercapainya penerapan indikator standard pelayanan minimal RSUD.	2019 dan 2020	RSU Kota Tangerang Selatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Sedang meningkatkan sarana dan prasarana layanan RSUD Kota Tangerang Selatan.	Belum dapat menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.	Menetapkan kebijakan/peraturan walikota tentang kerja sama dengan pihak lain pada BLUD RSUD Kota Tangerang Selatan.	Dapat terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan.	2019	RSU Kota Tangerang Selatan
				Terbangunnya sistem pendaftaran melalui SMS gateway dan pendaftaran online melalui website.	Belum lengkapnya fitur yang tersedia dalam pelayanan SMS gateway.	Mengembangkan sistem pendaftaran SMS gateway sesuai dengan kebutuhan.	Memper mudah proses pendaftaran melalui SMS gateway.	2020	RSU Kota Tangerang Selatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya pelayanan kesehatan maksimal telah melebihi pelayanan dasar (basic six).	Masih adanya tumpang tindih peran dan fungsi tenaga kesehatan dalam siklus waktu kerja pelayanan.	Penambahan jumlah pegawai dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.	Terselenggara nya pelayanan kesehatan berkualitas yang berkesinambungan di unit-unit pelayanan kesehatan.	2019-2021	Dinas Kesehatan
				Pelayanan rujukan terintegrasi melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan penanganan kegawatdaruratan IBU melahirkan melalui sijari emas.	Terbatasnya kerjasama pelayanan rujukan kesehatan antar rumah sakit.	Menyusun kebijakan tentang pelayanan rujukan kesehatan antar rumah sakit.	Tertanganinya permasalahan kesehatan sesuai harapan dan kebutuhan.	2019-2021	Dinas Kesehatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan meraih predikat IKM predikat "Baik" pada tahun 2018.	Belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat.	Mempercepat proses pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat.	Meningkatnya IKM.	2019-2021	Dinas Kesehatan
				Telah terintegrasinya perizinan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan dengan dengan DPMPSTP.	-	-	-		



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Menyediakan prasarana dan sarana pendukung pelayanan sesuai standar pelayanan (ruang baca, ruang bermain anak, charger hand phone, ruang laktasi, kursi roda, kamar kecil khusus disabilitas.	Belum optimalnya pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung pelayanan sesuai standar pelayanan.	Perlu adanya dukungan tenaga teknis dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung pelayanan.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di tingkat kecamatan.	2016-2021	Kecamatan
				Layanan cek kesehatan bagi masyarakat pengguna layanan.	Ruangan dan tenaga kesehatan yang masih terbatas.	Menyusun kerjasama penyediaan tenaga kesehatan dengan perangkat daerah / unit kerja.		2016-2021	Kecamatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Layanan whatshap center no. 08777 244 3535.	Terbatasnya jam layanan whatsapp center.	Menyusun kebijakan kepala perangkat tentang penugasan operator layanan 24 jam.		2020-2021	Kecamatan
				Melaksanakan kopi bareng camat setiap triwulan.	Perencanaan dan penganggaran belum dilakukan secara berkelanjutan.	Mengalokasikan dan mengagendakan layanan kopi bareng camat.		2016-2021	Kecamatan
				Telah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak PBB dan BPHTB dan ruang pelayanan Non PBB dan BPHTB.	Belum optimalnya sarana dan prasarana seperti lahan untuk ruang pelayanan.	Membuat <i>blueprint</i> terkait penataan ruang pelayanan pajak.	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelayanan pajak.	2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Pendekatan pelayanan dengan melaksanakan pelayanan keliling dan sosialisasi serta talkshow tentang pajak daerah.	Terbatasnya kendaraan operasional pelayanan pajak keliling.	Penambahan penyediaan kendaraan operasional untuk pelayanan keliling.	Terlaksananya kegiatan pelayanan pajak keliling dengan optimal.	2019-2021	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelayanan pajak secara online berupa aplikasi SIMMPLE PBB, ETA (Easy To Acces), e-SPTPD Berbasis Android dan IOS.	Belum optimalnya pelaksanaan standard pelayanan.	Melakukan evaluasi dengan pihak internal dan eksternal terkait standard pelayanan.	Meningkatnya kualitas standard pelayanan pajak di Kota Tangerang Selatan.	2019-2021	Badan Pendapatan Daerah
					Belum adanya <i>service center</i> dalam pelayanan pajak.	Mempersiapkan sarana, prasarana dan SDM <i>service center</i> dalam pelayanan pajak.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak di Kota Tangerang Selatan.	2020	Badan Pendapatan Daerah

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya loket bank BJB untuk pembayaran retribusi PKB.	Belum tertatanya kondisi ruangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.	Membuat <i>blue print landscape</i> ruang pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor.	Tersusunnya dokumen perencanaan pemanfaatan ruang pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang efektif.	2020	Dinas Perhubungan
				Telah diperbaikinya fasilitas lahan parkir pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.	Fasilitas parkir yang disediakan belum memenuhi syarat dan ketentuan.	Memenuhi prasarana dan sarana fasilitas parkir berupa pagar keliling dan lampu penenerangan.	Terciptanya situasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang kondusif.	2021	Dinas Perhubungan
				Telah tersedianya ruang tunggu yang nyaman ber-AC.	Belum dilaksanakan pembaharuan pada fasilitas ruang tunggu.	Memperbaharui fasilitas di ruang tunggu.	Meningkatnya kenyamanan bagi pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.	2020	Dinas Perhubungan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya fasilitas penyandang disabilitas.	Belum lengkapnya prasarana dan sarana bagi penyandang disabilitas.	Melengkapi prasarana dan sarana penyandang disabilitas yang dibutuhkan.	Pemerataan hak pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.	2020	Dinas Perhubungan
				Telah terkoneksi antara loket pendaftaran, bagian administrasi dan teknis untuk kendaraan pertama uji (baru) berbasis QR Code bagi kendaraan uji pertama.	Belum adanya aplikasi SIMPKB (sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor) pada setiap jenis layanan yang terintegrasi.	Melakukan percepatan pembuatan aplikasi SIMPKB dengan berkoordinasi bersama DISKOMINFO.	Mempercepat proses pelayan pengujian kendaraan bermotor.	2020	

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
					Belum menerapkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/D RJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.	Mengganti output layanan dari buku uji menjadi smart card.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelaikan jalan kendaraan bermotor.	2020-2021	Dinas Perhubungan
					Akses masuk dan keluar pengujian kendaraan bermotor belum layak untuk digunakan.	Menyampaikan usulan pembuatan akses masuk baru dan perbaikan akses keluar pengujian kendaraan bermotor.	Terciptanya situasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang kondusif.	2019	Dinas Perhubungan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
					Kurangnya SDM penguji kendaraan bermotor.	Mengusulkan pembukaan formasi CPNSD jabatan penguji kendaraan bermotor sesuai Anjab dan ABK.	Mempersingkat waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif.	2019	Dinas Perhubungan
				Membangun layanan informasi harga pasar melalui aplikasi Pantau Harga Pasar "PAGAR".	Proses pengiriman data harga bahan kebutuhan pokok masih dilakukan secara manual	melakukan inovasi percepatan pengiriman dan pengumpulan data berbasis teknologi	terciptanya informasi stabilitas harga sembilan bahan pokok ke masyarakat secara cepat dan akurat	2019-2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Memfasilitasi legalitas produk (PIRT, Desain Kemasan Produk, Sertifikasi Halal, Standar Produk dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pelaku industri kecil menengah	masih banyak IKM yang belum memahami standar produk	perlu dilakukan pelatihan sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha/IKM	terwujudnya produk IKM yang berdaya saing di dalam dan di Luar negeri	2019-2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				telah diraihnya predikat daerah tertib ukur bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan	belum maksimalnya Tera-Tera Ulang UTPP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)	melaksanakan tera tera ulang UTPP secara berkala dan melengkapi alat uji kemetrolonial	mempertahankan daerah tertib ukur	2019	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
			Penerapan pelayanan satu atap di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda	Telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Nomor : 5303/Kep.0951 - DPMPTSP/2017 Tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik online.	Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam pemeliharaan system perizinan online.	Rekrutmen tenaga ahli IT untuk melakukan pemeliharaan system perizinan on line.	Dapat memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
				Proses perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan dengan system online "simponie" (112 perizinan dan 25 perizinan) SILPER Akronim dari Sistem Informasi Layanan Perizinan, merupakan Aplikasi layanan informasi	Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara elektronik "OSS".	Menyusun perubahan dan sosialisasi Keputusan Walikota Nomor : 503/Kep.313-Huk/2017 Tentang Pendelegasian Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		2019, 2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				perizinan dengan sistem operasi REMIX berbasis Andriod melalui pemanfaatan Sosial Media "WhatsApp". Saat ini masih menyediakan 6 fitur utama : Sekilas info DMPTSP, Jenis & Syarat Perizinan , Alur Perizinan,Cek Status Izin dan Cek keaslian SK yang sudah terkoneksi dengan SIMPONIE.					
				Telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor : 503/Kep.313-Huk/2017 Tentang Pendelegasian Perizinan Dan Perizinan Kepada	Perlu ada penegasan Tugas dan fungsi jabatan dengan tugas sebagai tim teknis.	Mengusulkan dan melakukan pembahasan penegasan tugas dan fungsi jabatan dengan Tugas Tim Teknis Perizinan.		2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.					
				Telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait pengiriman surat keputusan perizinan.	Masih ada keluhan masyarakat terhadap lamanya pengiriman SK izin oleh PT POS	Melakukan integrasi SOP antara PT POS dengan DPMPTSP		2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
					Memberikan layanan arsitektur gratis "LARIS" untuk rumah tinggal diluar kawasan tertata.	Masih terbatas pada layanan rumah tinggal diluar kawasan tertata dan jumlah tenaga arsitek.	Rekrutmen tenaga arsitek agar dapat memberikan layanan kepada semua masyarakat.	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
						Belum optimalnya sosialisasi layanan arsitektur gratis “LARIS” dan pelayanan perizinan lainya ke lapisan masyarakat.	Melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait dan berkerjasama dengan media.	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
			Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari di masingmasing kementerian/lembaga dan pemda	Telah menerapkan Undang-undang No.25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.	Masih belum optimalnya pelayanan 1 hari kerja, karena terkendala oleh jumlah pengguna layanan dan verifikasi berkas secara akurat yang memerlukan waktu.	Mengadakan pelayanan administrasi kependudukan keliling dan membangun aplikasi tracking dokumen kependudukan.	Berkurangnya jumlah antrian pengguna layanan di kantor Disdukcapil.	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah menerapkan kebijakan deregulasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan.	Belum optimalnya sosialisasi kebijakan deregulasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan.	Melakukan sosialisasi serta memeberikan surat edaran kepada Camat, Lurah dan RT RW terkait SOP pelayanan pada DISDUKCAPIL.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan deregulasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan.	2020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Perubahan SOP pelayanan pada dinas dari 14 hari kerja menjadi 7 hari dan 1 hari kerja untuk urusan darurat.	Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dalam menjalankan prosedur 14 hari kerja menjadi 7 hari dan 1 hari kerja untuk urusan darurat.	Mengalihkan status dan tugas tenaga pelayanan dari instansi kecamatan dan kelurah menjadi petugas pelayanan DISDUKCAPIL.	Pelaksanaan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan satu hari jadi.	2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah disusun standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan, mengacu kepada amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis implementasi UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.	Masih terdapat tahapan proses perizinan yang melampaui batas waktu yang tertuang dalam SOP.	Meningkatkan pengawasan terhadap tahapan proses perizinan.	Tercapainya kepuasan masyarakat dengan kinerja layanan perizinan yang optimal.	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung percepatan pekayanan perizinan.	-	Memberikan <i>reward and punishment</i> terhadap kesesuaian SOP.	-	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
				Telah dilaksanakan nya penerapan standar prosedur dan operasional pelayanan publik di Kantor kecamatan sesuai sertifikasi ISO 9001:2015.	Belum semua pelayanan memiliki standar yang baku serta adanya proses pelayanan yang memerlukan dukungan perangkat daerah lain.	Menyusun Standar Pelayanan dan SOP lintas perangkat daerah.	Meningkat nya percepatan pelayanan kepada masyarakat.	2019-2021	Kecamatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Memberikan pelayanan modern secara online "PAMOR" ditingkat kecamatan.	Belum tersedianya prasarana dan sarana untuk menerapkan PAMOR di tingkat Kelurahan serta perlu dilakukan sosialisasi di lapisan masyarakat.	Mengusulkan pengadaan prasarana dan sarana dalam penerapan PAMOR.		2019-2021	Kecamatan
				Penerapan siap antar dokumen pelayanan di kecamatan "SIANTAR".	Belum semua masyarakat mengetahui pelayanan SIANTAR dan JUMARI.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.			Kecamatan
				Memberikan pelayanan kecamatan jumat malam hari "JUMARI".	-	-			Kecamatan



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
			Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di masing-masing kementerian/lembaga dan pemda	Pemotongan regulasi pembuatan surat pindah datang tanpa melalui RT RW Kelurahan dan Kecamatan.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pembuatan surat pindah datang.	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui RT RW Kelurahan, Kecamatan serta media sosial.	Percepatan proses pembuatan dokumen kependudukan pindah datang.	2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Menerapkan sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Belum ditetapkannya kebijakan regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Menyusun kebijakan tentang regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Meningkatnya kepatuhan pegawai tentang regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Menyusun perubahan Keputusan Walikota Nomor : 503/Kep.313-Huk/2017 Tentang Pendelegasian Perizinan Dan Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Masih terdapatnya masyarakat yang belum memahami proses pelayanan perizinan.	Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perizinan.	Tercapainya proses pelayanan di Kota Tangerang Selatan secara cepat, tepat, efisien dan efektif.	2019-2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
				penyempurnaan SOP dan pendelegasian kewenangan.					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah ditetapkan Keputusan Walikota No. 445.1/KEP.112-HUK/2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kota Tangerang Selatan.	Belum optimalnya pendapatan BLUD.	Diterapkannya Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.	2019	RSU Kota Tangerang Selatan
				Telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Belum diaturnya struktur kelembagaan BLUD RSUD Kota Tangerang Selatan.	Menyusun perubahan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2015 tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada	Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.	2019	RSU Kota Tangerang Selatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				pada RSUD Kota Tangerang Selatan.		RSUD Kota Tangerang Selatan.			
				Menerapkan sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Belum ditetapkan kebijakan regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Menyusun kebijakan tentang regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Meningkatnya kepatuhan pegawai tentang regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	2020	Dinas Kesehatan
				Adanya layanan kesehatan keliling.	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang disediakan dan terbatasnya wilayah jangkauan layanan.	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana.		2020-2021	Dinas Kesehatan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.	Belum optimalnya integrasi tugas dan fungsi antar perangkat daerah terkait.	Fasilitasi komitmen perangkat daerah terkait dalam sinergitas pelaksanaan penerapan PERDA	Meningkatnya data basis wajib pajak daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah.	2019-2021	Badan Pendapatan Daerah
					Belum tersusunnya mekanisme atau SOP pendaftaran wajib pajak daerah.	Menyusun prosedur mekanisme pendaftaran wajib pajak daerah dan mensosialisasi kannya.	Kepastian dan kemudahan persyaratan pendaftaran baru Wajib Pajak.	2019	Badan Pendapatan Daerah
				Adanya SOP pelayanan PKB dalam tiap jenis pelayanan baik makro dan mikro.	Belum ditetapkannya kebijakan pembentukan UPTD pengujian kendaraan bermotor.	Melakukan percepatan dengan berkoordinasi bersama unsur terkait penetapan pembentukan UPTD pengujian kendaraan bermotor.	Ditetapkan nya UPTD pengujian kendaraan bermotor.	2019	Dinas Perhubungan

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Telah menyusun kajian akademis tentang pembentukan UPTD pengujian kendaraan bermotor.					
			Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di masing-masing kementerian/ lembaga dan pemda	Tersedianya <i>bandwidth</i> sebesar 2GBps untuk <i>main core</i> dan <i>backup bandwidth</i> sebesar 1GBps.	Tidak tersediannya sarana prasarana yang layak di setiap lokasi. (Lahan, Genset, dan sebagainya).	Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana yang layak di setiap lokasi yang terus dikejar setiap tahunnya.	Tersedianya jaringan internet yang handal dan optimal untuk melayani seluruh layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	2019-2021	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Pengelolaan Internet yang sudah tersentralisasi dan terintegrasi di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Belum tersedianya SDM dalam jumlah yang cukup dan handal untuk mengelola seluruh jaringan internet milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Pelatihan terhadap SDM yang tersedia di Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Diskominfo & OPD pengguna layanan Diskominfo).	Terlayannya layanan akses internet gratis yang memadai dan optimal hingga keseluruhan ruang publik yang ada di Kota Tangerang Selatan.	2019-2021	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Layanan distribusi internet hingga ke tingkat puskesmas dan kelurahan.	Masih belum tersentralisasin ya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang masih berada di beberapa perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	<i>Sharing knowledge</i> antar tenaga ahli dan aparaturnya.	Terlayannya fasilitas layanan pengaduan & <i>Call Center</i> di Kota Tangerang Selatan.	2019-2021	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya data center Kota Tangerang Selatan sebagai pusat Data.	-	Surat edaran Sekretariat Daerah selaku ketua TAPD untuk sentralisasi penganggaran & pengelolaan IT di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya akan diperkuat dengan Peraturan Walikota.	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Internet dan Komunikasi yang memadai dan handal untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	2019	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Tersedianya <i>command center</i> Kota Tangerang Selatan sebagai media informasi & media pengambilan keputusan pimpinan daerah.	-	-	Tersedianya Data Center yang memadai dan handal untuk mrnjadi pusat data seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya CCTV sebanyak 72 Unit di beberapa ruang pelayanan publik, seperti : Pasar Serpong, Pasar Ciputat, Taman Kota I, Taman Kota II, Tandon Ciater, TPA Cipeucang, Gedung Parkir Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.	-	-	Tersedianya <i>Command Center</i> yang memadai dan handal untuk menjadi media pengambil keputusan dan media monitoring pimpinan daerah.	-	
				Pembangunan Jaringan Fiber Optic hingga ke OPD diluar Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, 7 Kecamatan & RSUD Kota Tangerang Selatan.	-	-	Peraturan Walikota yang menegaskan sentralisasi penganggaran dan pengelolaan IT di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Area Perubahan	Arah Kebijakan	Target	Sudah Dicapai, Permasalahan, Solusi Dan Harapan				Rencana Aksi (Tahun)	Perangkat Daerah Pengampu
				Yang Sudah dicapai.	Permasalahan	Solusi	Harapan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. SASARAN : BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS									
				Tersedianya layanan pilot sidak online di ruang pelayanan dengan pilot project DISDUKCAPIL dan BAPENDA.	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pembuatan aplikasi dalam perencanaan & pelaksanaan pada <i>time table</i> .	Adanya perbedaan <i>platform</i> dengan aplikasi lain yang akan diintegrasikan dan belum adanya dokumentasi pada sebagian sistem aplikasi.	Integrasi dengan aplikasi Lain.	Meningkatnya manajemen perencanaan & pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi.	2019	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Melakukan pengembangan aplikasi APIK.	Belum optimalnya pengembangan aplikasi APIK.	Pemindahan server aplikasi APIK dari BKPP ke data center Kota Tangerang Selatan.		2021	Dinas Komunikasi dan Informatika

## BAB III

## AGENDA REFORMASI BIROKRASI

*Fokus Perubahan, Indikator Keberhasilan Rencana,*

*Program Kegiatan Dan Target Matriks, Quick Wins, Inovasi, Pengorganisasian,*

---

### 3.1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Dalam menentukan fokus perubahan, telah dilakukan identifikasi hal-hal yang sudah dicapai/baik, hal-hal yang perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, hal-hal yang masih perlu diperbaiki (permasalahan) serta harapan dari pemangku kepentingan. Fokus perubahan lima tahun kedepan dalam rangka reformasi birokrasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

#### 1. Prioritas Yang Harus Dipelihara

Dalam menentukan prioritas hal-hal yang sudah dicapai dan perlu terus dipelihara, maka dapat diukur berdasarkan tingkat kepentingan yang diputuskan oleh OPD masing-masing untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam 8 area perubahan sebagai berikut:

Tabel 6  
Prioritas Yang Harus Dipelihara

No.	Uraian		OPD Pengampu
1.	a.	Melakukan penataan kelembagaan secara berkala agar terwujud kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.	Bagian Organisasi & KA
	b.	Pelaksanaan tugas dan penerapan pelayanan berbasis teknologi.	
	c.	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah.	
2.	a.	Mengundang <i>stakeholde</i> yang terkait, berkualitas dan berkepentingan dalam perumusan kebijakan peraturan, termasuk juga instansi luar daerah.	Bagian Hukum
	b.	Menginventarisir kembali peraturan dan membahas kembali peraturan yang tidak relevan/mengalami perubahan.	
3.	a.	Pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan.	Bagian Pemerintahan
	b.	Penyusunan LPPD melalui sistem <i>online</i> (semi <i>online</i> ).	
	c.	Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah.	

No.	Uraian		OPD Pengampu
4.	a.	Mengadakan Bimtek dan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi SPSE yang berkelanjutan.	Bagian Layanan Pengadaan
	b.	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
	c.	Pembaharuan prasarana dan sarana pendukung pengadaan barang/jasa.	
5.	a.	Melaksanakan <i>Training Of Trainer (TOT)</i> tunas integritas untuk para pejabat eselon 2 dan 3 se-Kota Tangerang Selatan.	Inspektorat
	b.	Asessment penilaian integritas pada lingkup inspektorat.	
	c.	Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap perangkat daerah secara berkelanjutan.	
	d.	Melakukan review dokumen perencanaan dan anggaran.	
6.	a.	Pelaksanaan penelaahan RKA/DPA secara <i>online</i> dalam rangka meningkatkan efesiensi pelaksanaan birokrasi.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	b.	Penerapan aplikasi SIMRAL dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sudah terintegrasi dengan SIAP BMD.	
7.	a.	Penyempurnaan sistem penelaahan <i>online</i> .	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b.	Selalu melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan.	
9.	a.	Memberikan pelayanan terbaik, cepat, akurat dan optimal di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.	Dinas Komunikasi dan Informasi
10.	a.	Layanan sadar arsip.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	b.	Pembinaan dalam pengelolaan kearsipan, agar pengelola arsip semakin handal dan mandiri.	
11.	a.	Pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara <i>online</i> .	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	b.	Pelayanan pada dinas dari 14 hari kerja menjadi 7 hari dan 1 hari kerja untuk urusan darurat.	
	c.	Pembuatan paket dokumen kependudukan.	
12.	a.	Peningkatan kapasitas SDM.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	b.	Peningkatan sarana dan prasarana.	
	c.	Penguatan regulasi pelayanan.	

No.	Uraian		OPD Pengampu
13.	a.	Akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna.	Rumah Sakit Umum
	b.	Peningkatan hasil survei kepuasan masyarakat.	
	c.	Peningkatan capaian penerapan SPM.	
	d.	Penerapan SPO.	
	e.	Penerapan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan.	
	f.	Pendaftaran melalui SMS gateway dan pendaftaran secara <i>online</i> melalui website.	
	g.	Adanya sistem rujukan <i>online</i> (SPGDT).	
14.	a.	Pelayanan kesehatan keliling.	Dinas Kesehatan
	b.	Menerapkan sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	
	c.	Terintegrasinya perijinan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan dengan DPMPTSP.	
15.	a.	Memberikan pelayanan kecamatan jumat malam hari (JUMARI).	Kecamatan
	b.	Penerapan siap antar dokumen pelayanan di kecamatan (SIANTAR).	
	c.	Memberikan Pelayanan Modern Secara <i>Online</i> (PAMOR) ditingkat kecamatan.	
16.	a.	Peningkatan kualitas pelayanan.	Badan Pendapatan Daerah
	b.	Peningkatan kualitas SDM.	
17.	a.	Pencapaian ISO 9001:2015 tentang pelayanan publik.	Dinas Perhubungan
	b.	Menjalankan SOP.	
	c.	Akreditasi pengujian kendaraan bermotor.	
18.	a.	Penataan pasar kawasan tradisional.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Layanan informasi harga pasar secara <i>online</i> dan sertifikasi produk industri.	
	c.	Tim pengawas barang bersubsidi dan berbahaya.	

## 2. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

Pembinaan manajemen pemerintahan yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Pencapaian sasaran reformasi birokrasi tersebut melalui 8 (delapan) area yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh OPD berikut:

Tabel 7

## Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Kota Tangerang Selatan

No.	Uraian	OPD Pengampu
1.	a. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai karakteristik dan potensi daerah.	Bagian Organisasi & KA
	b. Menyusun dan menginventarisir <i>Standard Operasional Prosedur</i> (SOP) pada setiap perangkat daerah.	
2.	a. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengkajian, penyusunan dan perancangan produk hukum daerah.	Bagian Hukum
	b. Mempercepat pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah yang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.	
3.	a. Merencanakan dan menyusun <i>grand design</i> kerja sama daerah.	Bagian Pemerintahan
4.	a. Merevisi SOP sesuai dengan ketetapan peraturan presiden No. 16 Tahun 2018	Bagian Layanan Pengadaan
5.	a. Peningkatan integritas seluruh pegawai.	Inspektorat
	b. Menambah jumlah personil pengawas/pemeriksa.	
6.	a. Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan memaksimalkan aplikasi SIAP BMD.	Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah
7.	a. Melaksanakan Diklat perencanaan pada perencana perangkat daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Mengintegrasikan seluruh sistem perencanaan.	
8.	a. Menyatukan persepsi setiap OPD untuk mencapai visi & misi Kota Tangerang Selatan demi mengoptimalkan infrastruktur jaringan & komunikasi milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Dinas Komunikasi dan Informasi
9.	a. Melakukan revisi terhadap SOP arsip.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	b. Percepatan proses pembangunan gedung perpustakaan dan depot arsip tingkat kota.	
	c. Perlu ditetapkannya Keputusan Walikota tentang jabatan fungsional arsiparis dan pembantu pengelola arsip dari PNS dan Non-PNS.	
	d. Perlu adanya kebijakan kepala daerah tentang pengintegrasian data melalui sistem aplikasi kearsipan dari perangkat daerah.	
	e. Perlu adanya pencanangan target digitalisasi arsip.	
	f. Perlu disusun peraturan tentang penerapan SIKD.	

No.	Uraian		OPD Pengampu
10.	a.	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur dinas.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	a.	Penerpaan kode etik penyelenggaraan pelayanan.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12.	a.	Melakukan seleksi dan rekrutmen pegawai sesuai kompetensi.	Rumah Sakit Umum
	b.	Peningkatan kompetensi SDM.	
	c.	Menyusun perubahan Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2015 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Kota Tangerang Selatan.	
13.	a.	Peningkatan kompetensi petugas.	Dinas Kesehatan
	b.	Distribusi penempatan petugas sesuai dengan kebutuhan.	
	c.	Uji kompetensi dalam perekrutan dan penempatan pegawai.	
14.	a.	Peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pelayanan berbasis digital.	Kecamatan
	b.	Peningkatan kompetensi dan kode etik penyelenggara pelayanan.	
15.	a.	Peningkatan kualitas SDM dalam bidang pelayanan pajak daerah.	Badan Pendapatan Daerah
	b.	Pelayanan pengaduan masyarakat.	
16.	a.	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Dinas Perhubungan
	b.	Peningkatan kompetensi dan kuantitas penguji kendaraan bermotor.	
17.	a.	Penataan pasar kawasan tradisional.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### 3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Fokus perubahan yang terkait dengan pelayanan pada sektor tertentu dan strategis yang membutuhkan jangka waktu serta dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi pada rencana aksi reformasi birokrasi dan menjadi fokus pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas antara lain pada sektor;

Tabel 8

## Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Uraian	OPD Pengampu
1.	a. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubah dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.	Bagian Organisasi & KA
	b. Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai ketentuan dan dilakukan pengukuran secara berkala.	
2.	a. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka membantu perangkat daerah dalam penyusunan dan perancangan produk hukum daerah serta merintis adanya Analisis Produk Hukum Daerah (APHD) pada perangkat daerah.	Bagian Hukum
3.	a. Penyusunan Peraturan Walikota tentang reward dan punishment bagi penyelenggara pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.	Bagian Pemerintahan
4.	a. Membuat aplikasi Sistem Pengajuan Lelang (SIMPEL).	Bagian Layanan Pengadaan
5.	a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik secara berkala.	Inspektorat
6.	a. Peningkatan kemampuan sistem dan user/pengguna dalam mengimplementasikan aplikasi SIMRAL, Penelaahan <i>Online</i> , dan SIAP BMD.	Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah
7.	a. Meningkatkan <i>bandwith</i> aplikasi SIMRAL bagi pengguna.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran agar lebih mudah digunakan, cepat dan akurat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran secara <i>online</i> .	
8.	a. Peningkatan jaringan internet untuk OPD.	Dinas Komunikasi dan Informasi
	b. Peningkatan data <i>center</i> .	
	c. Mengoptimalkan fungsi <i>command center</i>	
	d. Penerapan <i>call center</i> pemerintah daerah.	
	e. Fasilitas layanan internet gratis bagi masyarakat.	
	f. Mengintegrasikan fasilitas-fasilitas IT seluruh <i>stakeholders</i> di Kota Tangerang Selatan.	
9.	a. Peningkatan kualitas SDM pengelola arsip.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	b. Penyediaan sarana pendukung sesuai dengan standar kearsipan.	
10.	a. Penggunaan aplikasi pendaftaran <i>online</i> pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	b. Meningkatkan penyampaian informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil melalui media elektronik dan media sosial.	
	c. Ruang konsultasi permasalahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	



No.	Uraian	OPD Pengampu
11.	a. Proses perizinan dan nonperizinan telah dilaksanakan dengan sistem <i>online</i> .	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	b. ditetapkan Keputusan Walikota tentang pendelegasian perizinan dan perizinan.	
	c. Bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.	
	d. Layanan Arsitektur Gratis (LARIS).	
12.	a. Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.	Rumah Sakit Umum
	b. Pengembangan sistem informasi rumah sakit.	
	c. Membuat inovasi dalam menyelenggarakan standar pelayanan minimal RSU.	
12.	a. Menyusun kebijakan tentang pelayanan rujukan kesehatan antar rumah sakit.	Dinas Kesehatan
13.	a. Kompetensi penyelenggara pelayanan dan prasarana dan sarana pendukung layanan.	Kecamatan
14.	a. Meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat.	Badan Pendapatan Daerah
	b. Mengoptimalkan pelayanan pajak berupa kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran.	
	c. Menambah jam buka loket pelayanan pada hari sabtu dan minggu.	
	d. Menyediaan <i>booth stand</i> pelayanan pajak di pusat perbelanjaan.	
15.	a. Pelayanan berbasis aplikasi SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) pada setiap jenis layanan yang terintegrasi.	Dinas Perhubungan
	b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor secara berkala.	
	c. Perlunya tenaga pengamanan dari instansi vertikal yang memiliki kewenangan penindakan ketertiban dan oknum yang menyalahi ketentuan.	
16.	a. Stabilitas harga 9 bahan pokok.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB).	
	c. Pengawasan pupuk, gas bersubsidi dan Bahan Berbahaya (B2).	
	d. Menjadikan Tangerang Selatan sebagai Daerah Tertib Ukur (UTTP)	

### 3.2 Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan Dari *Road Map* Reformasi Birokrasi

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, berikut indikator/ukuran keberhasilan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaras dengan sasaran reformasi birokrasi:

Tabel 9  
Indikator Keberhasilan  
*Road Map* Reformasi Birokrasi 2019-2021

No	Sasaran	Indikator	Baseline (2016)	Target (2021)
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini atas keuangan laporan WTP	WTP	WTP
		2. Meningkatnya Kapabilitas APIP	level 2	Level 3
		3. Mempertahankan Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	Level 3
		4. Predikat SAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	B	BB
		5. Penggunaan e-Procurement	90%	100 %
2.	Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan	B	A
3.	Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas	Rata-rata indek kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Tangerang Selatan	79 (B)	88 (A)

### 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Target Tingkat Mikro

Guna memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2016 – 2021 Kota Tangerang Selatan, maka ditetapkan rencana program yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 10  
Program dan Kegiatan Tingkat Mikro

No.	Uraian	Target	Keterangan	OPD Pengampu	
1.	a.	Program penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai pemetaan potensi dan karakteristik daerah.	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	Sedang Dilaksanakan	Bagian Organisasi & KA
	b.	Mempekuat program implementasi reformasi birokrasi di daerah .	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan		
2.	a.	Pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah.	Pendayagunaan dan pemanfaatan dokumentasi dan informasi hukum oleh semua pihak.	Sedang Dilaksanakan	Bagian Hukum
	b.	Pembahasan dan penyusunan produk hukum daerah.	Produk hukum daerah yang berkualitas dan berdayaguna.		
	c.	Pelayanan bantuan hukum dan HAM.	Pelayanan bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.	Akan Dilaksanakan	
3.	a.	Pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan.	Meningkatkannya kinerja pelayanan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Sedang Dilaksanakan	Bagian Pemerintahan
	b.	Mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Kunjungan Kerja.	Optimalnya prosedur penerimaan kunjungan kerja	Akan Dilaksanakan	
4.	a.	Fasilitasi penyusunan draft SOP dan kode etik pengadaan barang jasa Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Tersusunnya dokumen SOP dan kode etik pengadaan barang jasa Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Akan Dilaksanakan	Bagian Layanan Pengadaan
	b.	Menyusun standar pelayanan pengadaan barang/jasa.	Berkualitasnya pelayanan pengadaan barang/jasa.	Akan Dilaksanakan	

No.		Uraian	Target	Keterangan	OPD Pengampu
5.	a.	Pemeriksaan urusan dan belanja secara rutin.	Berkurangnya penyimpangan pertanggung jawaban pengelolaan kegiatan.	Telah Dilaksanakan	Inspektorat
6.	a.	Fasilitasi penyusunan laporan SAP OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	Opini WPT dari BPK.	Telah Dilaksanakan	Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah
7.	a.	Penyempurnaan IKU dan PK, dengan target sinkronisasi dan konsistensi antara RPJMD dan RENSTRA OPD.	Konsistensi antar dokumen perencanaan.	Sedang Dilaksanakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.	a.	Program penyediaan internet diseluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Terlayani Jaringan internet dari OPD, Puskesmas dan Kelurahan.	Telah dilaksanakan	Dinas Komunikasi dan Informasi
	b.	Program peningkatan <i>data center</i> Kota Tangerang Selatan.	Terlayaninya layanan pusat data bagi seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Akan dilaksanakan	
	c.	Program pembangunan <i>fiber optic</i> hingga seluruh wilayah di Kota Tangerang Selatan.	Mengintegrasikan seluruh jaringan <i>fiber optic</i> dari seluruh <i>Stakeholders</i> di Kota Tangerang Selatan untuk dapat meningkatkan fasilitas layanan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Telah dilaksanakan dan akan dikembangkan	
	d.	Program pembangunan CCTV hingga seluruh wilayah di Kota Tangerang Selatan.	Mengintegrasikan seluruh CCTV dari seluruh <i>Stakeholders</i> di Kota Tangerang Selatan untuk dapat meningkatkan fasilitas <i>monitoring</i> di wilayah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Telah dilaksanakan dan akan dikembangkan	

No.	Uraian	Target	Keterangan	OPD Pengampu	
	e.	Program pembangunan sidak <i>online</i> .	Penerapan sidak <i>online</i> yang diterapkan diseluruh ruang pelayanan publik milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang terhubung dengan <i>command center</i> .	Akan dilaksanakan	
10.	a.	Akuisisi arsip.	Tersedianya <i>data base</i> informasi arsip.	Sedang Dilaksanakan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	b.	Pembinaan dalam pengelolaan kearsipan.	Meningkatnya sistem kearsipan yang handal.	Sedang Dilaksanakan	
11.	a.	Program penataan administrasi kependudukan.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Telah Dilaksanakan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	b.	Menambah SDM pelayanan dari kecamatan menjadi aparat DISDUKCAPIL.	Meningkatnya kualitas pelayanan.	Akan dilaksanakan	
12.	a.	Tercapai pelayanan yang sesuai harapan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Sedang Dilaksanakan	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
13.	a.	Pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.	Memudahkan dan memaksimalkan kualitas pelayanan kepada pasien.	Akan dilaksanakan	Rumah Sakit Umum
	b.	Peningkatan kompetensi SDM.	Memaksimalkan kualitas pelayanan kepada pasien.	Akan dilaksanakan	
	c.	Pengembangan sistem informasi rumah sakit.	Memberikan kemudahan akses pelayanan kepada pasien.	Akan dilaksanakan	

No.	Uraian	Target	Keterangan	OPD Pengampu
14.	a. Pemanfaatan tanaman obat keluarga.	Agar masyarakat dapat memberdayakan lingkungan dan individu.	Telah Dilaksanakan	Dinas Kesehatan
15.	a. Integrasi sistem aplikasi pajak daerah dengan aplikasi perijinan, dengan target kemudahan mendapatkan data potensi wajib pajak dan kemudahan rekonsiliasi.	Meningkatnya data basis wajib pajak daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah.	Akan Dilaksanakan	Badan Pendapatan Daerah
	b. Penggunaan <i>call center</i> pajak daerah.	Terlayannya pengaduan dengan cepat dan akurat.	Akan Dilaksanakan	
	c. Pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah (akan dilaksanakan) dan penyusunan regulasi pajak daerah.	Meningkatnya kemudahan pengguna aplikasi dan kepastian regulasi pajak daerah.	Sedang Dilaksanakan	
16.	a. Pembayaran retribusi secara non tunai	Meminimalisir penyimpangan retribusi.	Akan Dilaksanakan	Dinas Perhubungan
17.	a. Fasilitasi sertifikat halal.	Terfasilitasinya produk industri di daerah	Sedang Dilaksanakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Fasilitasi HKI / <i>merk</i> .			
	c. Fasilitasi penyuluhan keamanan pangan.			
	d. Fasilitasi SNI.			

### 3.4 Quick Wins Dalam Reformasi Birokrasi

Program percepatan dalam Reformasi Birokrasi disebut Quick Wins, merupakan program yang mengawali proses Reformasi Birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan. Hasil akhir dari Program *Quick Wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau capaian kinerja pemerintah yang sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan karakteristik masing-masing, Pertimbangan utama adalah meningkatkan pelayanan masyarakat seperti pada :

Tabel 11  
Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi  
Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Tahun	OPD Pengampu
1.	Optimalnya penerapan SPSE 4.3 dalam layanan pengadaan barang/jasa.	2019	Bagian Layanan Pengadaan
2.	a. Seluruh pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan secara <i>online</i> .	2019	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	b. Melaksanakan pembaharuan aplikasi pendaftaran <i>online</i> terkait ketetapan waktu.	2019	
3.	a. e- ASB	2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b. Pengintegrasian RENJA.	2019	
	c. Penyempurnaan dokumen RENSTRA OPD	2019	
	d. Penyempurnaan dokumen RENJA OPD.	2019	
	e. Integrasi sistem evaluasi pembangunan dengan sistem perencanaan secara <i>online</i> .	2019	
4.	a. <i>Data center</i> , tersedianya <i>data center</i> Kota Tangerang Selatan yang handal dan optimal	2019	Dinas Komunikasi dan Informasi
	c. Sidak <i>online</i> , yang menggunakan teknologi <i>video conference</i> & CCTV yang saling terintegrasi agar pimpinan daerah dapat berkomunikasi dan memonitoring kondisi ruang layanan publik dimanapun dan kapanpun.	2019	
	b. Penyiapan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.	2020	
5.	a. Pengembangan pelayanan hemodialisa.	2019	Rumah Sakit Umum
	b. Pengembangan pelayanan PICU.	2019	
	c. Sistem pelaporan kesehatan ibu dan anak.	2019	
	d. Pengembangan pelayanan klinik <i>hemophilia</i> .	2020	
6.	a. Tercapainya 95% masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan.	2019	Dinas Kesehatan
	b. Kota Tangerang Selatan bebas jentik.	2020	
7.	a. Akreditasi dari KEMENHUB target awal tahun .	2019	Dinas Perhubungan
	b. Mengganti <i>output</i> layanan dari buku uji menjadi <i>smart card</i> .	2020	
8.	Pelayanan Modern secara <i>online</i> "PAMOR" diseluruh kecamatan tahun.	2020	Kecamatan
9.	Pelayanan pajak daerah dapat diakses melalui satu aplikasi induk berbasis <i>mobile</i> .	2020	Badan Pendapatan Daerah
10.	Meningkatkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tangerang Selatan.	2020	Bagian Organisasi & KA
11	Proses pengajuan dan <i>tracking</i> usulan penyusunan produk hukum daerah dilakukan secara digital.	2020	Bagian Hukum
12	LPPD dan SPM <i>online</i> .	2020	Bagian Pemerintahan

No.	Uraian		Tahun	OPD Pengampu
13	Mengadakan <i>dropbox</i> sebagai alat pengendalian gratifikasi pada seluruh perangkat daerah.		2020	Inspektorat
14	Optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD) di seluruh OPD		2020	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15	a.	Tersedianya depot arsip Kota Tangerang Selatan.	2020	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	b.	Perubahan arsip statis manual menuju ke arsip digital.	2021	
16.	a.	Terselenggaranya mall pelayanan publik.	2021	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	b.	Tersedianya <i>call center</i> pelayanan.	2021	
17.	a.	Tertatanya 7 pasar tradisonal	2021	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b.	Terwujunya Tangerang Selatan sebagai daerah tertib ukur	2021	

### 3.5 Inovasi Dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mengembangkan terobosan-terobosan baik dalam manajemen pemerintahan maupun pelayanan publik. Beberapa inovasi yang telah dilakukan merupakan sebahagian yang dapat disampaikan dalam dokumen *Road Map* ini dalah sebagai berikut :

Tabel 12

Inovasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

No.	Uraian		OPD Pengampu
1.	a.	Web e- organisasi adalah pelayanan informasi tentang kelembagaan, pejabat, tugas dan fungsi serta produk hukum yang disusun bagian organisasi dan kinerja aparatur yang dapat diakses oleh aparatur dan masyarakat luas.	Bagian Organisasi & KA
	b.	Aplikasi e-LKIP adalah media laporan dan pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah yang berbasis <i>online</i> .	
2.	a.	Web sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Tangerang Selatan secara <i>online</i> .	Bagian Hukum
	b.	Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Produk Hukum (SIAPH Tangsel) daerah berbasis Android dan IOS.	
3.	a.	Tersedianya aplikasi LPPD <i>Online</i> .	Bagian Pemerintahan
	b.	Mengadakan sistem <i>live monitoring</i> kinerja kecamatan dan kelurahan berbasis teknologi.	
4.	a.	Membuat aplikasi Sistem Pengajuan Lelang (SIMPEL).	Bagian Layanan Pengadaan



No.	Uraian		OPD Pengampu
5.	a.	Aplikasi SIM-HP.	Inspektorat
	b.	e-Audit.	
6.	a.	Penerapan Aplikasi SIMRAL.	Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah
	b.	Penelaahan RKA secara <i>online</i> .	
	c.	Penerbitan SP2D secara <i>online</i> .	
	d.	Penerapan Aplikasi SIAP BMD.	
7.	a.	e-MUSRENBANG	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	b.	e-RESES	
	c.	E-ASB	
	d.	SIMRAL	
8.	a.	Aplikasi LASIK dan APIK adalah media pengukuran kinerja aparatur di Kota Tangerang Selatan dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
9.	a.	Pelayanan internet gratis di ruang-ruang publik di Kota Tangerang Selatan.	Dinas Komunikasi dan Informasi
	b.	Sidak <i>Online</i> , yang menggunakan teknologi <i>video conference</i> & CCTV yang saling terintegrasi agar pimpinan daerah dapat berkomunikasi dan memonitoring kondisi ruang layanan publik dimanapun dan kapanpun.	
10.	a.	Arsip manual menjadi digital (digitalisasi arsip).	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	b.	Pelayanan kearsipan bagi masyarakat.	
11.	a.	Pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	b.	Pelayanan <i>online</i> pembuatan dokumen kependudukan.	
	c.	Pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kerjasama dengan instansi lain (MCD, KFC, Gramedia, dll ) untuk meningkatkan daya tarik masyarakat.	
12.	a.	SIMPONIE (112 perizinan dan 25 perizinan).	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	b.	SILPER akronim dari Sistem Informasi Layanan Perizinan.	
	c.	Kerjasama layanan antar dokumen dengan PT Pos Indonesia.	
	d.	Layanan Arsitektur Gratis (LARIS).	
13.	a.	Sistem rujukan <i>online</i> (SPGDT).	Rumah Sakit Umum
	b.	Pendaftaran melalui SMS gateway (SIMARSEL).	
	c.	Sistem Pendaftaran <i>Online</i> (SIPOLIN).	
	d.	Sistem Informasi Pemeliharaan Alat Kesehatan Terintegrasi (SI JEMPOL SAKTI).	
	e.	Sistem survey kepuasan melalui layar interaktif.	
14.	a.	SPGDT.	Dinas Kesehatan
	b.	SIJARI EMAS.	
	c.	Pembebasan biaya pengganti pengolah darah .	
	d.	SIMPUS.	
	e.	Program 1 rumah 1 jumantik.	

No.	Uraian		OPD Pengampu
15.	a.	Pelayanan Modern secara <i>online</i> (PAMOR) ditingkat kecamatan.	Kecamatan
	b.	Siap Antar dokumen pelayanan di kecamatan (SIANTAR).	
	c.	Pelayanan Jumat Malam Hari (JUMARI).	
16.	a.	e-SPTPD berbasis android.	Badan Pendapatan Daerah
	b.	e-SPTPD berbasis IOS .	
	c.	e- Eksten (data potensi).	
	d.	Aplikasi PADL.	
	e.	Pelayanan keliling pajak daerah.	
	f.	GERTAK (Gerakan Taat Pajak) penagihan gabungan `OPD.	
	g.	Pajak <i>Goes To Mall</i> (pendekatan pelayanan pajak di bungkus dengan talkshow).	
	h.	Integrasi aplikasi pajak daerah dengan aplikasi NIK . pada DISDUKCAPIL.	
	i.	PENTUNGAN (Penagihan Tunggakan).	
	j.	SIMMPLE PBB.	
	k.	ETA (Easy To Acces).	
17.	aplikasi SIMPKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor).		Dinas Perhubungan
18.	PAGAR TANGSEL (Pantau Harga Pasar) yang dapat di akses oleh masyarakat setiap hari dalam rangka tercapainya stabilitas kebutuhan 9 bahan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan inovasi berupa aplikasi		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### 3.6 Matriks Recana Aksi Program Reformasi Birokrasi Pemerintah

#### Kota Tangerang Selatan

Penyusunan rencana aksi disusun secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan memiliki jangka waktu yang jelas. Matriks rencana aksi terdiri dari ; (1) Rencana Aksi untuk 8 (delapan) area perubahan yaitu : (a) Area Mental Aparatur(mind set dan culture set/ pola pikir dan budaya kerja (b) pengawasan, (c) akuntabilitas, (d)organisasi/kelembagaan (e) tatalaksana, (f) SDM aparatur, (g) Peraturan Perundang- Undangan (h) Pelayanan Publik dan (2) Rencana Aksi untuk Quick wins. Gambaran detail mengenai matriks rencana aksi pada tabel dibawah ini



RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																										
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																				
						2016/2017				2018				2019				2020				2021				
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Fasilitasi analisis manajemen SDM Aparatur (ASN)	Pengkajian kembali terkait kaidah dan prinsip-prinsip penyusunan perhitungan analisis jabatan.	Tersedianya dokumen analisis jabatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk manajemen ASN Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Rp 200,000,000																			V	V	
Target : Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit.																										
3	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur.	Fasilitasi analisis manajemen SDM aparatur (ASN).	Mengoptimalkan tugas dan fungsi tim evaluator kinerja ASN.	Meningkatnya kinerja ASN Kota Tangerang Selatan.	Rp 250,000,000												V				V		V	V	V	











RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9			Melakukan sosialisasi Perubahan Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Optimalnya penerapan Perubahan Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Rp 39,350,000												V								

RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10			Melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas.	Meningkatnya estetika berpakaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Rp 50,000,000																				
11			Melakukan pendampingan identifikasi kebutuhan dan penetapan tim kerja yang akan melakukan penyusunan pada perangkat daerah.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendampingan penyusunan SOP dan hasil yang maksimal.	Rp 100,000,000									V				V				V		V	V



RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																													
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																							
						2016/2017				2018				2019				2020				2021							
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN							
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
14	Penguatan Tatalaksana	Peningkatan Tata laksana Manajemen Perangkat Daerah dan Unit Kerja	Melakukan pendampingan kepada semua perangkat daerah dalam menyusun SOP lintas perangkat daerah.	Meningkatnya kinerja dan tepatnya pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah.	Rp 350,000,000													V				V				V		V	V
Target : Meningkatkan kualitas pelayanan.																													
15	Penguatan Tatalaksana	Peningkatan Tatalaksana Manajemen Perangkat Daerah dan Unit Kerja	Melakukan pendampingan identifikasi kebutuhan dalam penyusunan manajemen mutu pada perangkat daerah.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pendampingan penyusunan manajemen mutu.	Rp 375,000,000										V				V							V	V	V	

RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Penataan Pelayanan Publik di Kota Tangerang Selatan	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standard Pelayanan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik.	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kota Tangerang Selatan.	Rp 300,000,000											V				V			V	V	V

RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.																									
17	-	-	Menyusun instruksi walikota tentang implementasi SAKIP di Kota Tangerang Selatan.	Selarasnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan kota.	Rp -											V									
18	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKIP) Kota Tahun 2019	Penghimpunan data Pendukung LAKIP/LKIP Kota Tahun 2019	Meningkatnya Predikat penilaian LAKIP/LKIP di Kota Tangerang Selatan.	Rp 178,000,000										V			V				V		V	V
			Penginputan Data Pendukung LAKIP/LKIP Kota Tahun 2019											V			V			V		V	V		







RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah	Fasilitasi Penyusunan Kajian Akademis Penataan Perangkat Daerah dan Perwal SOTK dan TUSI	Mengagendakan pembahasan penataan kelembagaan perangkat daerah yang melakukan perubahan dan Penyusunan Kajian Akademis	Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.	Rp 180,000,000														V					V	

RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21			Melakukan sosialisasi dan mendorong pemahaman aparatur disemua lapisan/tingkat di internal perangkat daerah.	Sinerginya pelaksanaan tugas dan kewenangan antar perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan.	Rp 30,000,000														V				V		V
Target : Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Perangkat daerah.																									
22	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah	Fasilitasi Penataan Perwal SOTK dan TUSI Perangkat Daerah/ Unit Kerja	Melakukan survey internal keorganisasian perangkat daerah.	Ketepatan dimensi, kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi kelembagaan perangkat daerah.	Rp 50,000,000														V				V		V





RENCANA AKSI BAG.ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
26.	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Fasilitasi analisis manajemen SDM aparatur (ASN)	Mengoptimalkan tugas dan fungsi tim evaluator kinerja ASN.	Meningkatnya kinerja ASN Kota Tangerang Selatan.	Rp 250.000.000													V				V		V	V

## B. Bagian Pemerintahan

RENCANA AKSI BAGIAN PEMERINTAHAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.																									
1	Reformasi Birokrasi	Penguatan Kelembagaan	Penyusunan Peraturan Walikota tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi penyelenggara pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Rp. 100.000.000,-														v						

RENCANA AKSI BAGIAN PEMERINTAHAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	Menyusun kajian pemekaran kelurahan berdasar Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.	Terwujudnya komposisi kelurahan yang proporsional.	RP. 200.000.000																	v			

RENCANA AKSI BAGIAN PEMERINTAHAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	Kerjasama Pemba ngunan Dan Kewilaya han.	Koordina si Kerjasa ma Daerah.	Merencana kan dan me yusun <i>grand design</i> kerja sama daerah serta Melakukan sosialisasi dan monev.	Terciptanya perencanaan kerja sama daerah yang optimal.	RP. 300.000.000 ,-													v							



RENCANA AKSI BAGIAN PEMERINTAHAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	Peningkatan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Memfasilitasi pembangunan sistem LPPD on line	sinkronisasi program ditingkat Kota, Provinsi dan Nasional serta peningkatan kinerja perangkat daerah	RP. 50.000.000,-													v							
			Memfasilitasi hasil penilaian LPPD agar menjadi bahan evaluasi dalam dokumen perencanaan perangkat daerah		RP. 230.000.000,-									v				v				v		v	v



































RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Merevisi SOP seleksi JPT.	Hasil kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi dapat tepat waktu dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.	Rp 1,600,000,000										v	v		v	v	v	v	v	v	v	
Target : Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di Kota Tangerang Selatan.																									
14	Manajemen Kepegawaian	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk pengembangan fitur pelayanan	Meningkatnya pelayanan sistem informasi ASN	Rp 70,000,000									v				v				v		v	v







RENCANA AKSI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	Manajemen Perubahan	Evaluasi Penilaian Kerja Pegawai	Menambah fitur bukti dukung terhadap penilaian aktifitas harian pada APIK.	Penilaian kinerja individu lebih objektif	Rp 1,250,000,000												v				v		v	v	v
Target :Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di Kota Tangerang Selatan																									
22	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Pemetaan Pegawai	Penyusunan perubahan peta pegawai	Kesesuaian peta pegawai dengan perencanaan kebutuhan pegawai	Rp 160,000,000											v				v		v	v	v	





RENCANA AKSI INSPEKTORAT																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7			Melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi mengenai layanan <i>coaching clinic</i> secara berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.										V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
Target : Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Kota Tangerang Selatan.																									
8	Reformasi Birokrasi	Penguatan Pengawasan	Menerbitkan surat edaran pengadaan <i>dropbox</i> sebagai alat pengendalian gratifikasi di Kota Tangerang Selatan.	Meningkatnya kepatuhan aparatur dalam melaporkan tindakan gratifikasi.													V				V		V	V	V
9			Melakukan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara berkala di Kota Tangerang Selatan	Meningkatnya pengendalian gratifikasi di Kota Tangerang Selatan	Rp 11,256,000												V				V		V	V	V





RENCANA AKSI INSPEKTORAT																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Reformasi Birokrasi	Penguatan Pengawasan	Melakukan evaluasi berkala hasil tindaklanjut evaluasi SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis manajemen kinerja	Rp 690,307,000									V				V				V		V	V
Target : Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.																									
14	Reformasi Birokrasi	Penguatan Pengawasan	Meningkatkan fungsi pengawasan internal secara berjenjang oleh perangkat daerah.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.	Rp 12,402,000										V				V			V	V	V	





RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Mempersiapkan sarana, prasarana dan SDM service center dalam pelayanan pajak.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak di Kota Tangerang Selatan	Rp 500,000,000														V						
Target : Penanganan pengaduan masyarakat di Kota Tangerang Selatan																									
7	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur	Pelatihan SDM khususnya dalam bidang pelayanan dan teknologi komunikasi informasi.	Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang pelayanan dan teknologi komunikasi informasi.	Rp 200,000,000												V				V		V	V	V





RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur	Mengoptimalkan Bimtek/ Diklat yang dilakukan secara mandiri.	Tersedianya SDM pelayanan pajak yang kompeten dan profesional.	Rp 250,000,000												V				V		V	V	V
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	Mempercepat kegiatan tindak lanjut hasil survey masyarakat.	Meningkatnya kepuasan masyarakat.	Rp 100,000,000																V		V	V	V
14	Program Penge-lolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Mempercepat proses percepatan penetapan kebijakan tentang tata cara penyitaan.	Optimalnya tugas dan fungsi juru sita dalam pelayanan pajak.	Rp 50,000,000																V				







RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan	Melaksanakan Diklat/ Bimtek perencanaan pada perencanaan perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum	Melaksanakan Diklat perencanaan pada perencanaan perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat	Melaksanakan Diklat perencanaan pada perencanaan perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	Melaksanakan Diklat perencanaan pada perencanaan perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Diklat perencanaan pada perencanaan perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan	Melaksanakan Diklat perencanaan pada perencanaan perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Permukiman	Melaksanakan Diklat perencanaan pada perangkat daerah.	Perencana di perangkat daerah dapat menyusun perencanaan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.	Rp 100,000,000												V		V						

## 6. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi																									
1	Peningkatan Pengelola Aset Daerah	Pembinaan Pengelola Aset Daerah	Melakukan integrasi dokumen evaluasi ke dalam SIMRAL	Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.	-													v	v	v	v				











## 7. DINAS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatkan kepuasan masyarakat.																									
1	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Peningkatan kapasitas building dengan cara melaksanakan Bimtek dan <i>Personality Improvement</i> .	Peningkatan pelayanan sehingga tercapai kepuasan masyarakat melalui panduan akreditasi.	Rp 1.500.000.000										v				v				v	v	v



DINAS KESEHATAN																										
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																				
						2016/2017				2018				2019				2020				2021				
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Penambahan jumlah pegawai dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan berkualitas yang berkesinambungan di unit-unit pelayanan kesehatan.	Rp 1.875.000.000									v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	
4	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplementer	Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan	Menyusun kebijakan tentang pelayanan rujukan kesehatan antar rumah sakit.	Tertangganya permasalahan kesehatan sesuai harapan dan kebutuhan.	Rp 1.500.000.000										v				v					v	v	v

DINAS KESEHATAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Mempercepat proses pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat.	Meningkatnya IKM.	Rp 500,000,000										v				v				v	v	v
Target : Penanganan pengaduan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.																									
6	Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Penyediaan SDM penangan pengaduan dan prosedur serta ruang pengaduan dengan mengedepankan rasa simpatik yang tinggi.	Setiap keluhan ataupun pengaduan dapat direspon dan ditangani kurang dari 24 jam.	Rp 400,000,000													v	v				v	v	

DINAS KESEHATAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
7	Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Menambah media informasi terkait pelaporan pengaduan.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pelaporan pengaduan.	Rp 100,000,000														v	v			v	v	
Target : Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Kota Tangerang Selatan.																									
8	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Menyusun kebijakan tentang regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Meningkatnya kepatuhan pegawai tentang regulasi sistem istirahat bergiliran tanpa menghentikan waktu pelayanan.	Rp 200,000,000														v	v					



DINAS KESEHATAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Melakukan peremajaan sarana dan prasarana.	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang dalam mempercepat proses pelayanan	Rp 45.000.000.000														v	v	v	v	v	v	v

## 8. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal.																									
1	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Penyusunan Regulasi Pelayanan Kearsipan	Revisi perwal No. 41 Tahun 2013 tentang klasifikasi arsip yang disesuaikan dengan kelembagaan	Seluruh perangkat daerah berpedoman pada perubahan Perwal No. 41 Tahun 2013.	Rp 45,000,000.00												v	v							
2	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Penyusunan Regulasi Pelayanan Kearsipan	Melakukan revisi terhadap SOP arsip.	Revisi SOP arsip menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kearsipan.	Rp 30,000,000.00									v	v			v	v						

RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																										
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																				
						2016/2017				2018				2019				2020				2021				
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	Percepatan proses pembangunan gedung perpustakaan dan depot arsip tingkat Kota.	Depot arsip menjadi pusat rujukan layanan dan penyediaan data/informasi	Rp 1,569,000,000.00											v	v	v	v	v	v	v				
4	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Penyusunan Regulasi Pelayanan Kearsipan	Perlunya disusun kebijakan tentang penyediaan ruang <i>record center</i> .	Tertatanya arsip inaktif di seluruh perangkat daerah.	Rp 30,000,000.00													v	v							

RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengadaan sarana penyimpanan	Penyediaan sarana pendukung sesuai dengan standar kearsipan	Optimalnya pengelolaan arsip di seluruh OPD menuju digitalisasi arsip.	Rp 4,675,000,000.00													v	v	v	v				
6	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Penyusunan Regulasi Pelayanan Kearsipan	Perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang jabatan fungsional arsiparis dan pembantu pengelola arsip dari PNS dan Non-PNS.	Adanya jabatan fungsional arsiparis dan pembantu pengelola arsip dari PNS dan Non-PNS.	Rp 100,000,000.00													v	v	v	v				



RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Penyusunan Regulasi Pelayanan Kearsipan	Perlu adanya kebijakan kepala daerah tentang pengintegrasian data melalui sistem aplikasi kearsipan dari perangkat daerah.	Tertatanya arsip digital.	Rp 30,000,000.00														v						

RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan	Perlu adanya pencanangan target digitalisasi arsip.	Melaksanakan digitalisasi arsip sesuai target.	Rp 80,000,000.00															v	v				
10	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Pembinaan Kearsipan	Perlu dilakukan pendampingan terhadap pengelola arsip dalam mengoperasikan sistem aplikasi kearsipan daerah.	Pengelola arsip handal dalam mengoperasikan sistem aplikasi kearsipan daerah.	Rp 70,000,000.00																	v	v	v	v

RENCANA AKSI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
11	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Penyusunan Regulasi Pelayanan Kearsipan	Perlu disusun peraturan tentang penerapan SIKD.	Telah ditetapkan peraturan tentang penerapan SIKD.	Rp 30,000,000.00														v						



## 9. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencan Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.																									
1	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi Dan Media Massa	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	Meningkatkan penanganan pengaduan terhadap proses pelayanan perizinan baik secara online (live chat) atau secara langsung.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang di dukung dengan prasarana, sarana dan SDM yang sesuai kompetensi dan standar pelayanan serta	Rp 200,000,000									v				v				v		v	v
2	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Sosialisasi dan Publikasi Perizinan	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.	tercapainya proses pelayanan di Kota Tangerang Selatan secara cepat, tepat, efisien dan	Rp 450,000,000												v				v		v	v	v













RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																												
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencan Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																						
						2016/2017				2018				2019				2020				2021						
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN						
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
16	Pengembang an Pelayanan Perijinan	Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Pembangunan	Merencanakan pembangunan pelayanan.	Meningkatnya kualitas pelayanan.	Rp 150,000,000												v		v				v	v	v			
17		Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Kesra			Rp 150,000,000														v		v				v	v	v	
18		Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Ketenagakerjaan			Rp 150,000,000															v		v				v	v	v
19		Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Sosial Budaya			Rp 150,000,000															v		v				v	v	v





RENCANA AKSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencan Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
23	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Sosialisasi dan Publikasi Perizinan	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perizinan.	Tercapainya proses pelayanan di Kota Tangerang Selatan secara cepat, tepat, efisien dan efektif.	Rp 450,000,000												v			v			v	v	v









RENCANA AKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Program Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan	operasional UPT Pasar	Meningkatkan Kemampuan SDM tenaga administrasi dan Lapangan	Jumlah kawasan Perdagangan tradisional yang di kelola	Rp3,000,000,000												v				v		v	v	v
9	Program Pengembangan Industri	pelatihan dan pengembangan industri keratif	Perlu dilakukan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Kepada Pelaku Usaha /IKM	Jumlah kelompok IKM yang di bina	Rp1,000,000,000												v				v		v	v	v

## 11.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Penanganan pengaduan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.																									
1	Reformasi Birokrasi	Penguatan area perubahan pengawasan reformasi birokrasi.	Menyusun kebijakan tentang penetapan tim kerja dan penerapan aplikasi "Siaran Tangsel"	Semua Laporan permasalahan warga dapat ditindak lanjut dengan segera.	Rp 50,000,000																				
2	Pengembangan Teknologi Informasi	Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informasi	Mempercepat proses uji coba penerapan call center 112.	Mempercepat proses penanganan pengaduan yang bersifat kedaruratan.	Rp 800,000,000											v				v					
3	Reformasi Birokrasi	Penguatan area perubahan pengawasan reformasi birokrasi.	Menyusun kebijakan tentang penetapan tim kerja dan penerapan call center 112.	Memberikan layanan pengaduan kegawat darurat yang optimal.	Rp 50,000,000													v							





RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6	Pengembangan Teknologi Informasi	Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informaasi		Terlayannya fasilitas Layanan Pengaduan & Call Center di Kota Tangerang Selatan.	Rp 700,000,000												v								
7	Reformasi Birokrasi	Penguatan area perubahan pengawasan reformasi birokrasi.		Tersedianya Infrastruktur Jaringan Internet dan Komunikasi yang memadai dan handal untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Rp 1,690,000,000																v				

RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Pengembangan Teknologi Informasi	Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informaasi		Tersedianya Data Center yang memadai dan handal untuk mrnjadi pusat data seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan.	Rp 4,000,000,000												v				v		v	v	v
9	Pengembangan Teknologi Informasi	Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informaasi		Tersedianya Command Center yang memadai dan handal untuk menjadi media pengambil keputusan dan media monitoring pimpinan daerah.	Rp 6,000,000,000																v		v	v	v







RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
17	Pengembangan Komunikasi Sistem Informasi dan Media Massa	Fasilitasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan standar layanan publik	Menjadi Badan Publik yang Informatif	Rp 150,000,000												v								
Target : Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tangerang Selatan.																									
18	Reformasi Birokrasi	Penguatan area perubahan pengawasan reformasi birokrasi.	Membangun komitmen dan persamaan persepsi tujuan dalam manajemen pengelolaan aplikasi (rapat koordinasi, FGD)	Mendapatkan indeks SPBE katagori baik	Rp 50,000,000																v				

RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19			Menyusun kebijakan tentang centralisasi pengelolaan IT di Kota Tangerang Selatan.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan.	-									v											
20	Pengembangan Teknologi Informasi	Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Teknologi dan Informaasi	Pembangunan jaringan fiber optic secara bertahap.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan.	Rp 150,000,000												v				v				





## 12. DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatnya kepuasan masyarakat.																									
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Menyusun kebijakan layanan PKB	Menyusun kebijakan jumlah volume layanan pengujian kendaraan bermotor perhari.	Terciptanya situasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang kondusif.	Rp -										V	V	V								
2	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Quality Control PKB	Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM <i>quality control</i> .	Terjaminnya kualitas hasil pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Rp 100,000,000														V	V			V	V	
		Pengadaan/ penyediaan fasilitas penilaian kepuasan masyarakat	Mengganti fasilitas penilaian kepuasan masyarakat menjadi layar interaktif.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian.	Rp 100,000,000													V	V	V	V				

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Target : Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.																									
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyusunan DED ruang pelayanan publik PKB	Membuat <i>blue print landscape</i> ruang pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor.	Tersusunnya dokumen perencanaan pemanfaatan ruang pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang efektif.	Rp 100,000,000													V	V	V	V				
		Menyusun DED ruang pelayanan publik PKB	Memenuhi prasarana dan sarana fasilitas parkir berupa pagar keliling dan lampu penenerangan	Terciptanya situasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang kondusif.	Rp 100,000,000														V	V	V	V			

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Pembangunan Fasilitas Parkir	Memperbaiki fasilitas di ruang tunggu.	Meningkatnya kenyamanan bagi pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.	Rp 300,000,000																				
		Rehabilitasi ruang tunggu PKB	Melengkapi prasarana dan sarana penyandang disabilitas yang dibutuhkan.	Pemerataan hak pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor.	Rp 200,000,000													V	V	V	V				
		Pengadaan Sistem Penggantian Buku Uji Menjadi Kartu Uji (Smart Card)	Melakukan percepatan pembuatan aplikasi SIMPKB dengan berkoordinasi bersama DISKOMINFO	Mempercepat proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Rp 300,000,000													V	V	V	V				



RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi (Solusi)	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4	-	Koordinasi dengan instansi terkait, Membuat Surat/ Nota Dinas	Melakukan percepatan dengan berkoordinasi bersama unsur terkait penetapan pembentukan UPTD pengujian kendaraan bermotor.	Ditetapkan nya UPTD pengujian kendaraan bermotor.	Rp -												V	V	V	V					
Target : Penanganan pengaduan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.																									
5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengadaan/ penyediaan media himbuan alur pengaduan	Menyediakan media himbuan alur pengaduan berupa <i>running text</i> .	Tertanganinya pengaduan secara efektif.	Rp 50,000,000													V	V	V	V				



RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	Penataan Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Menyusun modul pedoman penggunaan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.	Meningkatnya kepatuhan instansi dalam pemanfaatan data kependudukan dan pelaporan data balikan.	Rp 50,000,000														V						
4	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Melaksanakan internalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana	Dapat memberikan sarana dan prasarana yang maksimal.	Rp 100,000,000														V						
5	Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan	Fasilitasi termin Diklat 2 kali dalam setahun.	Meningkatnya kesadaran SDM pelayanan dalam penerapan <i>excellent services</i> .	Rp 500,000,000												V				V				





RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Mengadakan pelayanan administrasi kependudukan keliling dan membangun aplikasi tracking dokumen kependudukan.	Berkurangnya jumlah antrian pengguna layanan di kantor Disdukcapil.	Rp 350,000,000													V	V	V	V				
9	Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Melakukan sosialisasi sosialisasi serta memeberikan surat edaran kepada Camat, Lurah dan RT RW terkait SOP pelayanan pada DISDUKCA PIL	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan deregulasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan.	Rp 100,000,000													V							

RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Mengalihkan status dan tugas tenaga pelayanan dari instansi kecamatan dan kelurahan menjadi petugas pelayanan DISDUKCAPIL	Pelaksanaan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan satu hari jadi.	Rp 4,392,000,000											V	V								
Target : Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Kota Tangerang Selatan.																									
11	Penataan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui RT RW Kelurahan ,Kecamatan serta media sosial.	Percepatan proses pembuatan dokumen kependudukan pindah datang.	Rp 200,000,000													V							















RENCANA AKSI RUMAH SAKIT UMUM																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran	Menetapkan kebijakan/p eraturan walikota tentang kerja sama dengan pihak lain pada BLUD RSUD Kota Tangerang Selatan.	Dapat terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan.	Rp 88,700,000									v											
Target : Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Kota Tangerang Selatan																									
14	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Medis Massa	Pengembangan dan Pengadaan Pendukung Pelayanan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	Mengembangkan sistem pendaftaran SMS gateway sesuai dengan kebutuhan	Mempermudah proses pendaftaran melalui SMS gateway	Rp 1,000,000,000													v	v	v					

RENCANA AKSI RUMAH SAKIT UMUM																									
No	Program	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Rencana Anggaran (Rp)	TAHUN PELAKSANAAN																			
						2016/2017				2018				2019				2020				2021			
						TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN			
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan RS/Sarana Lanjutan	Menyusun kebijakan tentang program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Meningkatnya kepatuhan dan peran serta rumah sakit dalam memberikan pelayanan rujukan kesehatan	Rp 30,000,000													v	v	v					

### 3.7 Pengorganisasian Reformasi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Berikut ini organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan.

#### A. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

- |   |            |  |
|---|------------|--|
| 1 | Pembina I  | Walikota Tangerang Selatan   |
| 2 | Pembina II | Wakil Walikota Tangerang Selatan.  |
| 3 | Pengarah   | Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.  |
| 4 | Ketua      | Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan; dan                                    |
| 4 | Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. |

#### B. TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Pokja I. Area Bidang Manajemen Perubahan dan Sumber Daya Manusia, dengan susunan keanggotaan :

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 1 | Penanggungjawab | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.  |
| 2 | Koordinator     | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.  |
| 3 | Sekretaris      | Kepala Subbagian Perencanaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan.   |
| 4 | Pelaksana       | 1. Kepala Bidang Pendayagunaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan; |

2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan; dan
3. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Pokja II. Area Bidang Pengawasan, dengan susunan keanggotaan:

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | Penanggungjawab | Inspektur Kota Tangerang Selatan.   |
| 2 | Koordinator     | Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang Selatan.  |
| 3 | Sekretaris      | Kepala subbagian perencanaan pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan.   |
| 4 | Pelaksana       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;</li> <li>2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;</li> <li>3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan;</li> <li>4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan; dan</li> <li>5. Para Fungsional, Pengawas, Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pada Inspektur Pembantu.</li> </ol> |

Pokja III. Area Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan susunan keanggotaan:

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 1 | Penanggungjawab | Asisten Tata Pemerintahan.   |
| 2 | Koordinator     | Kepala Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah.                            |
| 3 | Sekretaris      | Kepala Subbagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah. |

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 4 | Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan; dan</li> <li>2. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan dan Bina Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah.</li> </ol> |
|---|-----------|---|

Pokja IV. Area Bidang Akuntabilitas, dengan susunan keanggotaan :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Penanggungjawab  | Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat   |
| 2 | Koordinator I<br>(Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah) | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.  |
| 3 | Sekretaris   | Sekretaris pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.   |
| 4 | Pelaksana  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perencanaan Data dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;</li> <li>2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pemerintahan Umum pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan; dan</li> <li>3. Kepala Seksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> </ol> |

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | Koordinator II<br>(Akuntabilitas<br>Keuangan) | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.   |
| 6 | Sekretaris                                    | Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.  |
| 7 | Pelaksana                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Akuntansi pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan; dan</li> <li>2. Kepala Bidang Aset pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.</li> </ol> |

Pokja V. Area Bidang Perundang-undangan, dengan susunan keanggotaan :

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | Penanggungjawab | Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik Dan Hukum.  |
| 2 | Koordinator     | Kabag Hukum SETDA.  |
| 3 | Sekretaris      | Kasubag Perancangan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum SETDA.  |
| 4 | Pelaksana       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada SETDA</li> <li>2. Kasubag Dokumentasi Hukum SETDA</li> </ol> |

Pokja VI. Area Bidang Pelayanan Publik, dengan susunan keanggotaan

- |   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 1 | Penanggungjawab | Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.  |
| 2 | Koordinator     | Kepala Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur.   |
| 3 | Sekretaris      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag Ketatalaksanaan dan Bina Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi dan Kinerja Aparatur.</li> <li>2. Kasubag Perencanaan pada Perangkat Daerah Penanggungjawab Area Perubahan</li> </ol> |

## 4 Pelaksana

1. Camat Ciputat;
2. Camat Pamulang;;
3. Camat Serpong
4. Camat Pondok Aren;
5. Camat Setu;
6. Camat Ciputat Timur;
7. Camat Serpong Utara;
8. Kepala Bidang pada Kominfo;
9. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan;
10. Kabid Perencanaan, Pengembangan, dan Pengaduan pada DPMPTSP Kota Tangerang Selatan; dan
11. Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan.



## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

---

#### 4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta perangkatnya. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sejak rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk efektivitas penyelenggaraan monitoring maka dilaksanakan bersama tim assessor pemerintah daerah, yang ditetapkan Sekretaris Daerah Objek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.

##### 4.1.1. Metodologi Penilaian Monitoring

###### 1. Instrumen

Merupakan alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan *check list* kegiatan oleh tim assessor reformasi birokrasi daerah.

###### 2. Indikator Penilaian

Merupakan ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktivitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format sebagai berikut :

## Format Pelaksanaan Monitoring

Area Perubahan/OPD Penanggungjawab	Program/ Kegiatan/ Rencana Aksi	Target	Capaian	Keterangan

## 4.1.2. Mekanisme Monitoring

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode *check list*. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

## a. Observasi

Upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktivasi, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dalam waktu pelaksanaan.

## b. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan perangkat daerah penanggungjawab area perubahan.

## c. Analisa Monitoring

Analisa data pada program monitoring reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- (1) Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan.
- (2) Seberapa besar target yang dicapai dalam kurun dilakukan monitoring.

## 4.1.3. Laporan Monitoring

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan deskripsi hasil pelaksanaan monitoring.

Langkah-langkah pelaksanaan monitoring dalam rangka mendapatkan informasi yang tepat terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembentukan assesor, penetapan metode, teknik dan instrumen yang digunakan untuk menghimpun data pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan pengawasan, verifikasi, dan validasi sehingga memperoleh data yang dibutuhkan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada penanggung-jawab program dan kegiatan untuk bahan perbaikan dan pengembangan.

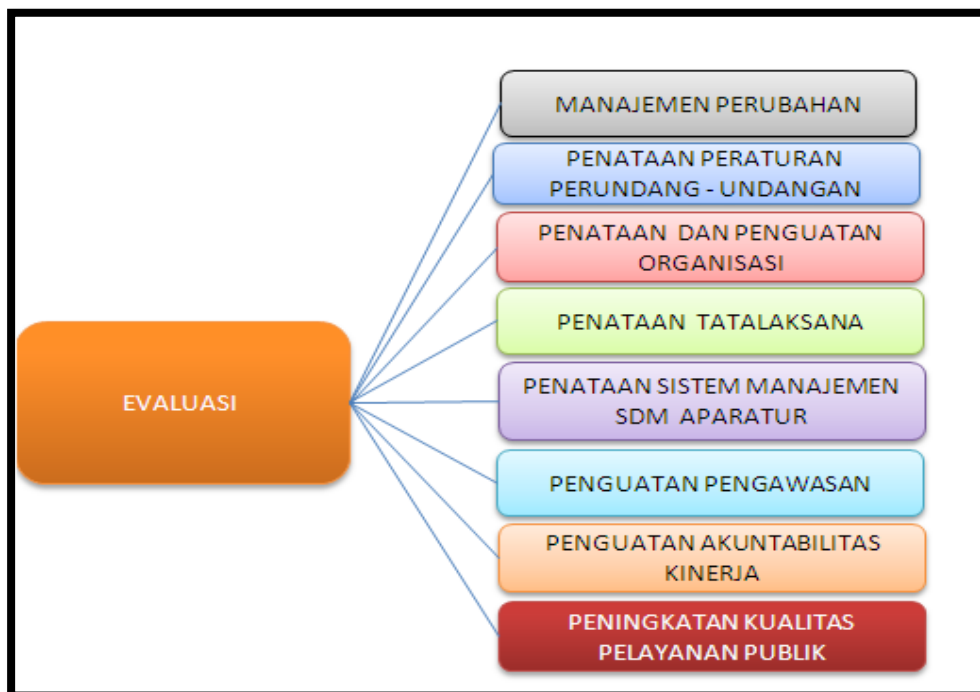
#### 4.2. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Evaluasi reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar

Sasaran Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Tangerang Selatan



Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

## BAB V

### PENUTUP

---

Penyempurnaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021 terus dilakukan untuk memuat rencana kerja rinci dan langkah-langkah penerapan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

RMRB ini disusun dengan memperhatikan permasalahan serta harapan pemangku kepentingan. Diharapkan dengan RMRB dapat membantu Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan menuju 3 (tiga) sasaran perubahan yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Keberhasilan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah juga tidak lepas dari Manajemen Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu terkait Pembentukan Organisasi (Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi) serta pengelola perubahan.

Dengan disusunnya Dokumen RMRB ini, maka Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh dalam melaksanakan manajemen perubahan serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan adanya dokumen RMRB ini maka perangkat daerah yang bertanggungjawab secara langsung area perubahan reformasi birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. RMRB ini merupakan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan *frame* yang sama yaitu 2016-2021, dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun.
2. RMRB ini menjadi dasar atau acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 (lima) tahun.

3. RMRB menjadi dasar penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi road map reformasi birokrasi secara regular dan periodik. Untuk itu masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan perubahan reformasi birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" at the top and "KOTA TANGERANG SELATAN" at the bottom, separated by a star on the left. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is visible. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Mohammad Ervin Ardani